

## Cuti ke Tiongkok, Gubernur Khofifah Tak Penuhi Panggilan KPK

SURABAYA, BN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dipastikan tidak dapat memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah kepada kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Khofifah tercatat sedang menjalani cuti untuk kepentingan pribadi, yakni menghadiri prosesi wisuda putranya, Jalaluddin Mannagalli

■ Bersambung ke hal.11 kol.1



Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. (ist)

# PROYEK BKK DESA DOROGOWOK DIDUGA JADI BANCAKAN

□ Anggaran Rp 1,475 M Th 2024 Dikerjakan Pihak Ketiga Th 2025



### LIPUTAN KHUSUS

LUMAJANG, BN - Anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Jawa Timur berupa Jasmas (Jaring Aspirasi Masyarakat) dari salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, yang ditempatkan di Desa Dorogowok, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, dengan nilai sangat fantastis Rp 1.475.000.000, - (1,475 Miliar), berupa bangunan drainase 3 Dusun di Lokasi yang berbeda : Dusun Panggung Gempol, Dusun Wringin Sari, Dusun Karangrejo.

Novi sebagai bendahara desa Dorogowok didampingi Herman Kaur Perencanaan, pada saat dikonfirmasi

Bidik Nasional (BN) Selasa (25/03/2025) jam 12.06 WIB di Balai Desa Dorogowok menyampaikan secara detail penempatan lokasi proyek, transferan masuk senilai Rp. 1,475 Miliar, sampai uang tersebut diambil semua oleh Kades Sura'i. "Tapi uang itu dibawa kemana dan acara apa dengan siapa, saya tidak tahu," kata Novi jujur.

Menurut sumber BN anggaran tersebut terserap di

■ Bersambung ke hal.10 kol.1



Novi Bendahara Desa bersama KAUR pada saat dikonfirmasi BN, Selasa (25/03/2025) pukul 12.06 WIB. (SON)

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR	
TAHUN ANGGARAN 2024	
JENIS KEGIATAN	: PEMBANGUNAN DRAINASE DESA
NOMOR SURAT	: 100.3.3.1/630/KPTS/013/2024
LOKASI DAN VOLUME	: DUSUN PANGGUNG GEMPOL 870 M
SUMBER DANA	: BKK PROVINSI JAWA TIMUR
TOTAL ANGGARAN	: Rp.1.113.399.527
WAKTU PELAKUAN	: JANUARI s/d APRIL
PELAKUSA KEGIATAN	: TIM LAKKEGIATAN



Proyek drainase Dusun Panggung Gempol Desa Dorogowok.

## Edan, Kejagung Sita Rp 11,8 Triliun Kasus Ekspor CPO Wilmar Group



Kejagung saat menggelar jumpa pers kasus dugaan korupsi Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Wilmar Group. (ist)

JAKARTA, BN - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita Rp11.880.351.802.619 atau lebih dari Rp11,8 triliun terkait dengan dugaan korupsi Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Wilmar Group. Penyitaan ini dilakukan dalam tingkat penuntutan oleh Jaks Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

"Bawa dalam perkembangan

■ Bersambung ke hal.10 kol.1

## PROYEK BRONJONG SUNGAI DERMAJI TAYEMTIMUR RUSAK JALAN SEKOLAH DAN MINIM KOORDINASI



Proyek Bronjong Sungai Dermaji Tayemtimur yang dikeluhkan warga. (Asep Sujana)

□ Kontraktor Diduga "Khianati" PPK OP SDA 2 BBWS Citanduy

CILACAP, BN - Proyek pemasangan bronjong di aliran Sungai Dermaji, tepatnya di belakang SMP Ahmad yani Desa Tayem Timur, kecamatan Karang Pucung kabupaten Cilacap, mendapat sorotan tajam dari Kepala Desa Tayem Timur Darsono Padilah. Selain dinilai kurang efektif karena tidak dimulai dari hulu, proyek ini juga disebut merusak akses jalan ke sekolah akibat lalu lintas kendaraan pengangkut material (langsir) yang melewati jalur tersebut.

"Sejak awal pekerjaan, tidak ada komunikasi dari pihak pemborong dengan pemerintah desa. Padahal proyek ini berada di wilayah kami dan berdampak langsung ke warga," ujar Darsono saat dikonfirmasi di kantor desa Jumat, 13 Juni 2025.

Darsono menegaskan, pemasangan bronjong yang tidak dimulai dari hulu sungai hanya memberikan perlindungan sementara. Sedang lahan warga di bagian atas sungai tetap tergerus. "Kalau tidak dari hulu, air tetap menghantam bagian atas dan merusak yang sudah dibangun di bawah," tambahnya.

■ Bersambung ke hal.11 kol.5

## Proyek Talud di Desa Rowoyoso Pekalongan Tanpa Papan Informasi, Diduga Langgar UU KIP



Proyek talud di desa Rowoyoso tanpa papan informasi. (Dikin)

PEKALONGAN, BN - Proyek pembangunan talud di Desa Rowoyoso, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan menjadi sorotan setelah diketahui tidak dilengkapi dengan papan informasi proyek. Kondisi ini dinilai melanggar prinsip transparansi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Pantauan di lokasi pada Senin (9/6/2025) menunjukkan bahwa pekerjaan fisik yang bersumber dari anggaran pemerintah tersebut berjalan tanpa adanya papan proyek yang memuat informasi dasar seperti jenis kegiatan, lokasi, volume pekerjaan, nilai kontrak, hingga jangka waktu pelaksanaan. Padahal, kewajiban pemasangan papan proyek telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbarui melalui Perpres Nomor 70 Tahun 2012.

Ketidakaan papan informasi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Tanpa transparansi data, sulit bagi publik dan lembaga pengawas seperti media maupun LSM untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran negara.

■ Bersambung ke hal.11 kol.1

## Kecoh Ribuan Massa, PN Sidoarjo Sukses Eksekusi Lahan 9,8 Ha di Tambakoso Waru



PN Sidoarjo, saat bacakan penetapan Eksekusi disalah satu bidang obyek sengketa di Tambakoso, Waru. (ist)



Abdul Salam, Kuasa Hukum PT Kejayaan Mas. (Teddy Syah)

SIDOARJO, BN - Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo akhirnya berhasil mengeksekusi lahan sengketa seluas 9,85 hektare di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Rabu (18/6/2025). Eksekusi ini dilakukan setelah melalui proses hukum panjang dan sempat tertunda dua kali akibat penolakan warga.

Sejak pagi, ribuan massa menolak eksekusi dan memblokade akses menuju lokasi. Mereka menempati sejumlah titik strategis untuk menghalangi petugas masuk ke area obyek sengketa. Situasi sempat memanas. Ketegangan antara warga dan aparat keamanan tak terhindarkan. Namun, personel gabungan dari PN Sidoarjo, TNI, Polresta Sidoarjo, dan Brimob Polda Jatim yang diterjunkan mampu mengendalikan keadaan.

Eksekusi dilakukan berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap yang memenangkan PT Kejayaan Mas, atas sengketa lahan dengan Elok Wahiba dan Miftahur Roiani. Perusahaan itu dinyatakan sebagai

■ Bersambung ke hal.10 kol.5

## Data Penerima Pupuk Subsidi Desa Genengadal Diduga Dimanipulasi



Contoh pupuk bersubsidi (Foto: ist)

GROBOGAN, BN - Dugaan manipulasi data dan penyelewengan pupuk bersubsidi muncul di Desa Kedung, Desa Genengadal, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Pasalnya, seorang Warga berinisial DK (45) mengaku data dirinya dipakai dan terdaftar dalam e-RDKK sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok untuk memperoleh pupuk bersubsidi secara ilegal.

Menurut kesaksian DK, pada Jumat (16/5/2025), ia tidak pernah menerima pupuk bersubsidi meski namanya tercatat dalam e-RDKK. Bahkan, sebenarnya dari tahun 2018 hingga kini tahun 2025 sekalipun tak pernah mengajukan persyaratan keabsahan dalam dokumen RDKK.

"Saya belum pernah sekalipun mengajukan dan menyerahkan persyaratan untuk keabsahan dokumen RDKK, tapi mengapa kok data diri saya masuk dalam dokumen e-RDKK untuk Kelompok Tani Makmur di Desa Kedung, Desa Genengadal. Bahkan tidak pernah melihat atau memegang kartu e-RDKK meskipun data saya tercatat aktif setiap bulan," ungkapnya.

Selain itu, DK menjelaskan bahwa ia tidak pernah mempunyai lahan pertanian dan perkebunan sebagai salah satu syarat sah untuk pengajuan data RDKK. Namun, ia merasa heran kenapa data dirinya terverifikasi dan tervalidasi di Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan secara sah dalam data penerima RDKK.

■ Bersambung ke hal.11 kol.1

## LOWONGAN WARTAWAN

Koran BIDIK NASIONAL Membutuhkan Wartawan yang akan ditempatkan di seluruh Indonesia. Peminat bisa kirim lamaran ke Jl. Ikan Lele 2/C114 Bluru Permai, Bluru Kidul, Sidoarjo atau Hubungi Bos EDY (HP/WA: 08123209649) email : bidiknasional@yahoo.com

## PN Sidoarjo Nyatakan PT Chalidana Wanprestasi, Pasutri di Perum Safira Juanda Menang Gugatan



Pasutri Didik Noga Ahfidianto dan Eva Sulistyorini, dengan Kuasa Hukumnya Rohmad Amrulloh (kanan). (Teddy Syah)

**SIDOARJO, BN** – Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo memutus perkara perdata Nomor: 275/Pdt.G/2024/PN.Sda dengan menyatakan bahwa PT. Chalidana Inti Cahaya (CIC) selaku penggugat sekaligus tergugat dalam rekonvensi, terbukti melakukan wanprestasi. Putusan dibacakan, pada 27 Mei 2025, lalu.

Kuasa hukum pasutri Didik Noga Ahfidianto dan Eva Sulistyorini, Rohmad Amrulloh, menyampaikan bahwa rekonvensi yang mereka ajukan dikabulkan majelis hakim. "Pada saat kami digugat oleh PT CIC, kita mengajukan rekonvensi yang dikabulkan oleh majelis. Tergugat PT CIC dinyatakan wanprestasi. Yang kedua, kita sebagai penggugat rekonvensi dihukum membayar kelebihan tanah," lanjutnya. Yang ketiga, putusan PN Sidoarjo adalah sebagai dasar peralihan

han atas objek yang menjadi gugatan," ujar Rohmad. Ia juga mengapresiasi kerja hakim yang dianggap telah memutus perkara berdasarkan bukti dan saksi yang diajukan secara adil dan proporsional. "Putusan ini membuat kami tetap percaya pada lembaga peradilan, khususnya di PN Sidoarjo. Para hakim betul-betul memeriksa perkara berdasarkan bukti dan menjunjung tinggi rasa keadilan serta kepastian hukum," tegasnya.

Namun, ia juga mengungkapkan bahwa PT Chalidana telah mengajukan banding pada 5 Juni 2025. Pihaknya pun langsung menanggapi langkah tersebut dengan mengajukan kontra memori banding melalui sistem e-Court. "Kami berharap hakim yang memeriksa perkara ini di tingkat banding mengacu pada rasa keadilan dan pertimbangan hukum yang sama dengan majelis hakim tingkat pertama. Putusan PN Sidoarjo ini sejatinya sudah 'win-win solution', seharusnya PT Chalidana tidak perlu banding. Tapi karena mereka tetap banding, ya kami hadapi," kata Rohmad.

Sementara itu, Eva, pihak

yang turut menjadi tergugat rekonvensi dalam perkara ini, mengaku senang dengan

gai developer," ujar Rohmad.

Ia juga mengapresiasi kerja hakim yang dianggap telah memutus perkara berdasarkan bukti dan saksi yang diajukan secara adil dan proporsional. "Putusan ini membuat kami tetap percaya pada lembaga peradilan, khususnya di PN Sidoarjo. Para hakim betul-betul memeriksa perkara berdasarkan bukti dan menjunjung tinggi rasa keadilan serta kepastian hukum," tegasnya.

Namun, ia juga mengungkapkan bahwa PT Chalidana telah mengajukan banding pada 5 Juni 2025. Pihaknya pun langsung menanggapi langkah tersebut dengan mengajukan kontra memori banding melalui sistem e-Court. "Kami berharap hakim yang memeriksa perkara ini di tingkat banding mengacu pada rasa keadilan dan pertimbangan hukum yang sama dengan majelis hakim tingkat pertama. Putusan PN Sidoarjo ini sejatinya sudah 'win-win solution', seharusnya PT Chalidana tidak perlu banding. Tapi karena mereka tetap banding, ya kami hadapi," kata Rohmad.

Ia menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik putusan ini dan menganggap sebagai solusi terbaik bagi kedua belah pihak, yakni pihak user (pembeli rumah) dan pengembang (developer). "Kami meyakini bahwa putusan tersebut adalah solusi terbaik bagi kedua belah pihak, yakni kami sejak user dan PT CIC seba-

putusan yang berpihak padanya. Ia menyebut sebelumnya pihak developer sempat meminta bayaran sangat tinggi tanpa kejelasan. "Sebelum masuk somasi, kami disuruh membayar Rp650 juta untuk satu unit rumah. Padahal yang mengukur dan membangun itu bukan kami, tapi pihak pengembang," ujar Eva.

Di akhir pernyataannya, Rohmad Amrulloh mengajak masyarakat untuk tidak ragu menempuh jalur hukum jika mengalami ketidakadilan. "Kami sampaikan kepada masyarakat umum agar tidak takut dan tidak ragu untuk mengajukan perkara melalui jalur hukum, yakni di pengadilan. Karena disanalah benteng keadilan masyarakat akan dilindungi," pungkasnya.

Dikonfirmasi kuasa hukum PT Chalidana Inti Cahaya, Siti Hamidah, enggan memberikan statemen terhadap Bidik Nasional. Namun, sebelumnya menegaskan bahwa harga yang ditawarkan sudah sesuai dengan SOP perusahaan, bahkan pihaknya sudah memberikan diskon. "Kami sebenarnya sudah memberikan diskon, namun seiring berjalannya waktu tidak ketemu masalah harga," ujarnya singkat. (Teddy Syah Roni)

## Sidang Perdagangan Ginjal, Pemodal Harus Dipidana

**SIDOARJO, BN** – Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana perdagangan organ ginjal ke India, Kamis (19/6/2025). Dalam kasus ini, pasangan suami istri asal Sidoarjo didudukkan sebagai terdakwa. Sidang yang berlangsung terbuka untuk umum itu menghadirkan dua saksi ahli dari bidang hukum pidana. Mereka memberikan keterangan guna memperjelas aspek yuridis dalam perkara yang menjerat kedua terdakwa. Saksi ahli pertama yang dihadirkan oleh tim penasihat hukum terdakwa adalah Bastian Nugroho, seorang akademisi dari Universitas Merdeka (Unmer) Surabaya.

Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, Bastian menyatakan bahwa transaksi jual beli organ tubuh manusia harus dilihat dari aspek hukum yang berlaku di Indonesia. Menurutnya, jika dilakukan di luar ketentuan hukum, maka dapat dikategorikan sebagai perdagangan ilegal. "Bercerita mengenai transaksi, maka itu berbicara mengenai perdagangan. Dan setiap perdagangan harus dilihat apakah melanggar hukum atau tidak," ujar Bastian.

Ia menegaskan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah secara eksplisit melarang segala bentuk eksplorasi manusia, termasuk dalam konteks jual beli organ tubuh.

Bastian juga menyoroti aspek kesepakatan dalam transaksi organ tubuh. Menurutnya, apabila ada persetujuan antara penjual dan pembeli, maka keduanya bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. "Eksplorasi itu adalah bagian dari perdagangan. Jika ada kesepakatan, maka penjual dan pembeli dapat juga dikenai sanksi pidana," terangnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan ketentuan Pasal 18 dalam Undang-Undang TPPO yang memberikan pengecualian



Saksi ahli lainnya, Yusron Marzuki, akademisi dari Universitas Narotama Surabaya. (Teddy)

apabila korban terbukti mengalami pemaksaan. Namun, ia mengingatkan bahwa pasal tersebut tidak bisa digunakan tanpa pembuktian yang memadai. "Harus ada bukti eksplisit bahwa korban dipaksa. Kalau tidak ada unsur pemaksaan, maka pasal pengecualian tidak bisa diterapkan," tambahnya.

Selain itu, Bastian juga menyampaikan bahwa pihak yang memodifikasi transaksi atau memfasilitasi proses jual beli ginjal juga dapat dikenai pidana. Hal itu merujuk pada Pasal 55 KUHP tentang penyerapan dalam tindak pidana. "Pemodal yang membantu kelancaran jual beli ginjal bisa juga dikenai sanksi berdasarkan Pasal 55 KUHP," tegaskan.

Sementara itu, dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU), turut dihadirkan saksi ahli lainnya, yakni Yusron Marzuki, akademisi dari Universitas Narotama Surabaya. Ia memberikan pandangan hukum dari sisi struktur delik dalam UU TPPO.

Menurut Yusron, dalam konteks delik TPPO, cukup dengan adanya tujuan dan maksud (mens rea), maka unsur perbuatan pidananya telah terpenuhi, bahkan sebelum tindakan benar-benar terjadi. "Delik dalam TPPO bisa bersifat formil dan culva. Kalau formil ada unsur kesengajaan, sedangkan culva bisa karena kelalaian. Dalam kasus ini, unsur kesengajaan sudah tampak," terang Yusron.

Ia juga menegaskan bahwa meski perbuatan terhenti, selama bukan karena kehendak pelaku sendiri, maka tetap bisa dikategorikan sebagai percobaan tindak pidana perdagangan orang. "Jika niat sudah ada, dan perbuatan dihentikan oleh pihak lain, bukan kehendak sendiri, maka masih bisa masuk dalam kategori percobaan TPPO," paparnya.

■ Bersambung ke hal.11 kol.1

## Rapat Paripurna DPRD Kab Sidoarjo Jawaban Bupati Tentang Pandangan Umum Fraksi - Fraksi



Rapat paripurna DPRD kabupaten Sidoarjo di gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo (17/6). (Foto: ist)

**SIDOARJO, BN** – Rapat digelar di ruang rapat lantai dua gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo pada (17/6). Bupati membahas pandangan umum fraksi-fraksi. Setelah itu, Bupati Subandi tidak lama membacakan jawaban di atas podium, langsung beberapa anggota DPR Walk Out (WO) meninggalkan ruang rapat karena merasa tidak puas atas jawaban Bupati Sidoarjo H. Subandi.

Keputusan KUA-PPAS Sah Meski Dihadir 15 Anggota DPRD Sidoarjo tidak berhenti membuat kehebohan. Permintaan maaf Bupati Subandi dalam rapat paripurna, kemarin dianggap tidak tulus dan sebagian besar memilih WO. Sehingga paripurna dilanjutkan dengan hanya 15 anggota saja.

Mungkin lengah atau tanpa disadari, bahwa ada paripurna pengambilan keputusan dalam paripurna ke-2, yakni Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS tahun 2025. Akhirnya kedua rancangan itu disahkan dalam rapat paripurna oleh 15 anggota saja. Saya tidak paham apakah sebuah keputusan seperti itu bisa diwujudkan secara paripurna dengan 15 anggota. Sementara dalam Tatib DPRD disebutkan keputusan dapat diambil bila anggota yang hadir memenuhi syarat atau kurum (25+1)

Kenapa keputusan kemarin bisa diambil? Karena sebagian besar anggota memilih walk out duluan pada paripurna ke-1. Padahal ada lanjutan rapat paripurna ke-2. Bagaimana kelanjutan dari episode berikutnya? Kita tunggu saja, hari esok pasti lebih indah dari hari ini.

Setelah Bupati Sidoarjo menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di depan para undangan rapat paripurna, permohonan maaf terkait atas kehilafan Bupati Sidoarjo dalam videonya yang lagi viral mengatakan, Bupati Bagian mengumpulkan dan mencari Uang untuk PAD kabupaten Sidoarjo, sedangkan DPRD yang bagian menghabiskan dengan menghambur-hamburkan uang APBD.

Setelah H. Subandi mengatakan permohonan maaf kepada para anggota DPRD yang hadir, sedangkan H. Abdillah Nasih ketua DPRD kabupaten Sidoarjo mengambil sikap yang sangat bijaksana yaitu dengan mengatakan kepada semua undangan rapat Paripurna DPRD kabupaten Sidoarjo.

Tlg permintaan maaf Bupati H. Subandi bisa diterima dengan hati yang sangat dalam, Ketua DPRD juga mengatakan, "tidak ada gading yang tidak retak" artinya sebaik-baik manusia tidak ada yang tidak luput dari kehilafan dan kesalahan. Sangat bijak sekali yang di katakan oleh ketua DPRD kabupaten Sidoarjo tersebut. (yah)

## Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Beri Penghargaan Anggota Berprestasi



Para anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang mendapat penghargaan foto bersama Kapolres AKBP Wahyu Hidayat. (rosi)

**SURABAYA, BN** – Polres Pelabuhan Tanjung Perak menggelar apel pemberian penghargaan kepada sejumlah anggotanya yang dinilai berprestasi. Apel yang dipimpin langsung oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Wahyu Hidayat, ini berlangsung khidmat di lapangan Mako Polres Pelabuhan Tanjung Perak, pada Selasa (17/6/2025).

Kegiatan ini merupakan wujud apresiasi pimpinan terhadap dedikasi dan pencapaian luar biasa yang ditunjukkan oleh para personel dalam menjalankan tugasnya. Turut hadir dalam acara tersebut para Pejabat Utama (PJU) dan Kapolsek di jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Dalam amanatnya, AKBP Wahyu Hidayat menyatakan bahwa pemberian penghargaan ini adalah bentuk pengakuan institusi Polri terhadap anggota yang telah menunjukkan prestasi dan dedikasi tinggi. "Pemberian penghargaan kepada anggota Polri merupakan suatu wujud penghargaan dari pimpinan kepada anggota atas prestasi yang telah dicapai," ujarnya.

Kapolres berharap, dengan adanya kegiatan ini, dapat menjadi pemantik semangat dan motivasi bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan kinerjanya dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. "Diharapkan dapat memberikan motivasi kepada anggota yang lain untuk selalu meningkatkan semangat yang lebih baik lagi, semakin baik dalam melaksanakan tugas," tambah AKBP Wahyu Hidayat.

Prosesi acara diawali dengan pembacaan keputusan Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan secara langsung oleh Kapolres kepada para penerima.

Salah satu penerima penghargaan, Kapolsek Kenjeran Kompol Yuyus Adiastanto, mendapat apresiasi khusus atas keberhasilannya dalam melaksanakan program ketahanan pangan. Program penanaman jagung seluas 1 hektar yang digagas berhasil memberikan hasil panen yang signifikan, yakni sebanyak 6.560 kilogram. Prestasi ini dinilai sejalan dan mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang salah satunya berfokus pada kemandirian pangan nasional.

Kemudian disusul Ipda Mochammad Mustofah, Kanit Jatanras juga turut menerima

■ Bersambung ke hal.11 kol.1



TERBIT SEJAK 1 JUNI 1999

**PEMIMPIN UMUM** : Pudji Leksono. **PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNGJAWAB** : Edy Sutanto. **PENASEHAT HUKUM** : Yustinus Haryanto, SH. **REDAKTUR PELAKU** : Budi Santoso. **REDAKTUR** : A Karim, EM Liswandi, Zaenal Ikhwan, Agus. **WAKIL REDAKTOR** : Teddy Pras Hendarto (Koordinator), Suprawoto, Suwoto. **JAWA TIMUR** : SURABAYA : Dynas Ma'rufi Santoso, Abd Rossi, Nini Rachmawati. **SIDOARJO** : Nur Yahya. **GRESIK** : Ariadi AM, Subkan Arif. **PAMEKASAN** : Ainur Halis. **SUMENEP** : Adi Yusman, Ishak. **SAMPANG** : Holilurohman. **MOJOKERTO** : Husnun. **JOMBANG** : Totok Agus Hariyanto (Kabiro), Devi Setyorini. **NGANJUK** : Agung Moch. Suhadu, Sugianto, Dodik Andiyanto. **KEDIRI** : Nyoto Dharmawan. **TULUNGAGUNG/ TRENGALEK** : Nik Atin. **MADIUN** : Basuki. **NGAWI** : Leo Lunardi T. **MAGETAN** : Ashar AR. **PONOROGO** : Andhy Wijaya. **LAMONGAN** : Syaiful Anam, Sulistiowati, Arif Mustofa, Joko Santoso. **BOJONEGORO** : Priyanto. **MALANG RAYA** : Asep Sujana. **SUMEDANG** : Ernawan Hidayat. **SUBANG** : Tohi (Kabiro), Sumantri, Anay, Kandiawan, Ahmad Saehu. **INDRAMAYU** : Candra Shema Restullah (Kabiro), Ragil Pangestu. **DEPOK** : Harahap (Kabiro), Fajri. **BEKASI** : Abdul Rachman. **KUNINGAN** : Edwar Panata Muda. **PURWAKARTA** : Anthon Ponto, Endin. **BOGOR** : Liswandi (Kabiro), Wardiyansyah Saputra, Firdaus. **JAKARTA/BANTEN** : Ayom Cahyono (Kabiro), Hari Wahyudi. **BALI** : Agung Wiarto. **SULAWESI SELATAN** : Dikdi Eko Sulistiwan. **WONOGIRI** : Heryanto. **SEMARANG RAYA** : Peni Kusumawati (Kabiro), Catur Prasetyo. **PEKALONGAN RAYA** : Sodikin (Kabiro), M. Khairul Anwar. **BATANG** : Rulidino (Kabiro), Bambang Hadi. **KENDAL** : Peni Kusumawati, Doni Kurniawati. **KUDUS** : Budi Setiawan. **GROBOGAN** : Heru Budianto. **SALATIGA** : Susilo Haryadi. **GORONTALO** : Rify Tama'un. **HALMAHERA SELATAN** : Anwar Suleman. **KALIMANTAN TENGAH** : MURUNG RAYA/BARITO UTARA : Effendi (Kabiro). **KALIMANTAN BARAT** : Sofyan Hadi. **KETAPANG** : Sukoarto. **KALIMANTAN UTARA** : Syamsudin (Kabiro). **ENIM** : Adi Nurahman. **PAGAR ALAM** : Marleo Tanjung. **OGAN KOMERING ULU/OKU SELATAN** : M Azhary MY, OKU TIMUR : Neli Sri Wahyuni. **OKI** : Nuris Octari. **SUMATERA UTARA** : KOTA MEDAN : Muhammad Syafei Harahap. **LABUHANBATU** : M. Sukma (Kabiro). **PAKPAK BHARAT** : Tennen Tumangger (Kabiro), Dariono. **DELI SERDANG** : Heri Siswoyo. **ASAHAN** : Tumin P, Sandro Matanael Hulu, Hengky Arnes. **NIAS UTARA** : Hadirat Syukur Harefa. **NIAS BARAT** : Odaligo Zai. **TAPANULI SELATAN** : Amir Hamzah Nasution. **SUMATERA BARAT** : PASAMAN: Suryadarma (Kabiro), Refidinal. **LAMPUNG** : WAY KANAN : Arie M Jahri. **LAMPUNG TIMUR** : Nuhiyin, Mueshin, Antoni. **LAMPUNG UTARA** : Eka Saputra (Kabiro), Triyutika Sari. **LAMPUNG SELATAN** : Muhibbin. **GORONTALO** : Muhammad Fahreza Khibrin Wibowo. **LAMPUNG BARAT** : M. Taufik TULANG BAWANG/TULANG BAWANG BARAT : Agus Daminto Bancin (Kabiro), Imran Cibro. **ACEH SINGKIL** : Roni Syehrani (Kabiro), Nurhalimah. **BIREUM** : Hendra S. BANGKA BELITUNG : Agusman Sirait (Kabiro), Tamrin. **JAMBI** : TANJUNG JABUNG BARAT : Joni Efendi. **NUSA TENGGARA BARAT** : Agus Daminto Bancin (Kabiro), Imran Cibro. **PRINGSEwu** : Iskandar. **BANDAR LAMPUNG** : Suhartono Hariwibowo. **TANGGAMUS** : - NANGROE ACEH DARUSSALAM GAYO LUES : Sutrisno (Kabiro), Simson Sitewu. **SUBULUSSALAM** : Agus Daminto Bancin (Kabiro), Imran Cibro. **ACEH SINGKIL** : Roni Sy

# Alun-alun Direvitalisasi, Masyarakat Sidoarjo Bakal Miliki Tempat Hiburan dan Icon Baru



Kepala Dinas DLHK Kabupaten Sidoarjo, Bahrul Amiq bersama AJS dan LSM Seven Gab. (Foto: ist)

SIDOARJO, BN - Alun-alun Sidoarjo jadi tempat ramah anak. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mempercantik diri. Di Tahun 2025, kota UMKM ini siap memiliki icon baru dengan merevitalisasi Alun-alun yang akan menjadi tempat ternyaman bagi seluruh masyarakat Sidoarjo khususnya anak-anak.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sido-

arlo, Moch Bahrul Amiq mengungkapkan sudah satu bulan ini, proses revitalisasi dilakukan dan ditargetkan akan selesai dalam tujuh (7) bulan mendatang.

"Semoga selesai sesuai dengan perencanaan dan akhir tahun bisa menjadi kado terindah bagi masyarakat Sidoarjo," kata Amiq di temui di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Jalan Raya Siwalan Panji

Sebagai icon baru Sidoarjo, sambung Amiq, sudah diawali dengan wajah teras

Sidoarjo, Rabu (18/05/2025) sore.

Amiq menjelaskan pi huknya sangat berharap masyarakat atau kelompok masyarakat bisa menjadi bagian dinamika untuk melakukan kontrol sosial bila dalam proses pembangunan revitalisasi ada hal-hal yang kurang pas.

"Kelompok masyarakat atau Seven Gab bisa membantu kontrol sosial dan bisa memberikan masukan dan saran kepada kami," ungkapnya.

Amiq kembali memegaskan dari awal pihuknya sudah mempublikasikan bahwa revitalisasi Alun-alun ini merupakan hajat bareng dan sudah melalui proses yang cukup panjang. "Diharapkan alun-alun ini akan menjadi icon baru sidoarjo yang kuat," tegasnya.

Sebagai icon baru Sidoarjo, sambung Amiq, sudah diawali dengan wajah teras

yang bagus yaitu Monumen Jayandaru dan akan dilakukan revitalisasi hingga ke belakang. Termasuk dengan pembangunan pedestrian yang lebar sebagai jogging track yang nyaman bagi masyarakat. Serta untuk anak-anak mendapatkan akses khusus bukan sebagai wahana bermain tetapi sekaligus wahana edukasi.

Ditempat yang sama, Ketua LSM Komunitas nasional (KOMNAS) sekaligus Sekretaris Persatuan LSM Seven Gab, Suryanto mengungkapkan pada dasarnya kami ingin dengan pembangunan Alun-alun sidoarjo akan memperindah Kabupaten Sidoarjo. Kami akan tetap melakukan kontrol sosial yang profesional. "Tentunya kami sangat berharap dengan revitalisasi Alun-alun ini bisa menjadi icon baru yang juga tempat yang nyaman bagi masyarakat Sidoarjo," tandasnya. (yah)

## Tunjang Perekonomian Desa, Pemdes Bagi Rabat Jalan Lingkungan Gunakan DDS TA 2025



Pemdes Bagi rabat jalan lingkungan di RT. 18. RW. 03 Dusun Gedangan, sumber anggaran berasal dari DDS (Dana Desa) TA. 2025 (Bas)

MADIUN, BN - Pembangunan infrastruktur jalan desa merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan wilayah pedesaan. Jalan desa yang baik dan terawat adalah kunci untuk meningkatkan koneksi antar desa, lingkungan dan menghubungkan desa dengan pusat pusat perekonomian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan Mulyanto selaku Kades Bagi.

Lebih lanjut dikatakan, pada tahun anggaran 2025 ini Desa Bagi Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun melaksanakan kegiatan rabat jalan lingkungan dilokasi RT. 18. RW. 03 Dusun Gedangan, sumber anggaran berasal dari DDS (Dana Desa) TA. 2025 sebesar Rp. 39.618.100.

Di lokasi lain, Prasetyo selaku tim pelaksana kegiatan (TPK) desa, menambahkan, kegiatan rabat jalan di dusun

Gedangan RT. 18. RW. 03 ini dengan volume pekerjaan 100 x 3 x 0,13 m, menelan anggaran sebesar Rp. 39.618.100 yang berasal dari Dana Desa (DDS) TA. 2025,

pelaksanaan secara swakelola oleh TPK desa. Sedang tenaga kerja dari warga lingkungan setempat secara padat karya, dan pekerjaan saat ini sudah selesai seratus persen.

Joko, salah satu warga setempat mengatakan, dengan adanya kegiatan rabat jalan lingkungan ini memiliki manfaat yang sangat besar untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Karena meningkatkan aksesibilitas, dengan jalan yang baik pen duduk desa dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan penting serta meningkatkan interaksi sosial kehidupan di desa, sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan," pungkasnya. (Bas)

## Pemdes Gilang Bangun Jalan Beton Senilai Rp 58 Juta



Pemerintah Desa Gilang Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo membangun jalan beton sebagai jalan tembus dari wilayah Dusun Gilang Selatan nyambung ke jalan Dusun Sambisari, Desa Sambibulu. (suwoto)

SIDOARJO, BN - Pemerintah Desa Gilang Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo membangun jalan beton sebagai jalan tembus dari wilayah Dusun Gilang Selatan nyambung ke jalan Dusun Sambisari, Desa Sambibulu. Pembangunan jalan alternatif seluas kurang lebih 31,5 M2 tersebut sudah dimulai sejak tanggal 3 Juni 2025 lalu hingga waktu 10

hari ke depan. Saat berita ini ditulis (17 Juni 2025), jalan beton yang dianggarkan dana senilai Rp.58.000.000 (termasuk pajak).

Sementara waktu jalan tersebut sudah boleh dilewati kendaraan roda dua. Selanjutnya jalan rabat cor beton yang menggunakan Tanah Kas Desa (TKD) berlokasi di RT 31 RW 08

Berdasarkan hasil musyawarah di lingkungan RW

08, kami Pemerintah Desa Gilang mengimbau kepada ketua RT dan ketua RW untuk memberitahukan kepada warganya agar mematuhi Peraturan Desa terkait pengguna/fungsi jalan tersebut demi menjaga kondisi jalan dan keselamatan," tulis Plh. Kades Gilang, H. Bakhruddin Alim dalam surat edarnya.

Ketua RT 30 RW 08 Wisma Gilang Permai, Suyadi membenarkan bahwa surat edaran peraturan desa (Perdes) perihal peraturan pengguna jalan alternatif itu. Surat edaran tertanggal 17 Juni 2025 bersifat penting perihal pemberitahuan pembatasan kendaraan ini, ditujukan kepada ketua RW 01 sampai dengan RW 08 se Desa Gilang.

"Berdasarkan hasil musyawarah di lingkungan RW

## KEHILANGAN STNKB

Telah hilang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Yamaha Vega, Tahun 2005, Warna Biru, Nopol: W-3460-NAE, Noka : MH345T1105K878855, Nosis : 4ST1245519 An Supardi. Hilang di wilayah hukum Polsekta Sidoarjo Selasa 20 Mei 2025 sekitar pukul 10.40 WIB. Bagi yang menemukan mohon hubungi Bpk Sutomo Dusun Glatik RT 03 RW 01, Kel/ Desa Klampisan, Kec Kandangan, Kab Kediri, HP: 081332434910

## KEHILANGAN SIM

Telah hilang Surat Ijin Mengemudi (SIM) C, atas nama Sutomo Dusun Glatik RT 03 RW 01, Kel/Desa Klampisan, Kec Kandangan, Kab Kediri. Hilang di wilayah hukum Polsekta Sidoarjo Selasa 20 Mei 2025 sekitar pukul 10.40 WIB. Bagi yang menemukan mohon hubungi Bpk Sutomo HP: 081332434910

## Tim UNESCO GLOBAL GEOPARK Kunjungi Desa Jono, Kades: Menuju Desa Wisata



Tempat penemuan fosil yang dikunjungi tim Geopark di hutan KRPH Sampang di Desa Jono. (Pri)

BOJONEGORO, BN - Desa Jono adalah kategori desa seni dan budaya. Ini ciri khas Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, Kamis 12/6/2025. Desa seni dan budaya dapat kunjungan tim validasi UNESCO GLOBAL GEOPARK (UGGP). Tim penilai mengunjungi pengrajin batik lokal khas Kabupaten Bojonegoro milik Paini atau

Makni yang berada di desa Jono.

Tim validasi melakukan penilaian dan mengunjungi penemuan sebuah benda bersejarah fosil ikan Hiu di KRPH Sampang Buntalan. Tim Verifikasi dan Validasi yang dipimpin dan diketuai Mirawati Sudjono menuturkan bahwa Bojonegoro mempunyai banyak prasejarah peninggalan benda benda bersejarah. Seperti halnya Fosil yang usianya mencapai Ratusan tahun bahkan jutaan tahun.

"Fosil ikan hiu yang ditemukan pegiat geologi Supangat purnawirawan angkatan darat ini pada tahun 2013 umurnya diperkirakan sudah 112 juta tahun yang lalu melalui penyusutan air laut ratusan juta tahun, sehingga menjadi daratan menyebabkan banyak ikan hiu mati tinggal tulang belulangnya serta giginya membantu dan menjadi fosil," ujarnya.

Sementara, Kepala Desa Jono, Hj. Henis Meindrawati kepada Awak media mengatakan, dengan adanya budaya seni batik dan penemuan budaya situs yang di temukan di desa Jono, ia berharap bisa menjadi kemajuan desa menuju wisata kedepan nya. "Sebagai ikon desa untuk itu, proses menjadi desa perlu dukungan berbagai pihak terutama pemerintah kabupaten daerah Bojonegoro," harapnya.

Kegiatan kunjungan, penilaian, validasi serta verifikasi dan validasi menuju UNESCO GLOBAL GEOPARK (UGGP) disaksikan dan diikuti oleh siswa sekolah dasar dan sekolah menengah termasuk mahasiswa dari UNIGORO.

Hadir FORFIMCAM Kecamatan Temayang dan Aktifis GEOPARK Bojonegoro, Dinas Pendidikan, Disperindag, Dinas Pariwisata, Perhutani KPH Bojonegoro, guru sekolah dasar dan menengah. (pri)

## Polresta Banyuwangi Raih Penghargaan Pelayanan Prima Kategori A Dari Kapolri



Polresta Banyuwangi meraih penghargaan Pelayanan Prima (Kategori A) Kapolri atas kinerja penyelenggaran pelayanan publik tahun 2024 (ist)

BANYUWANGI, BN - Polresta Banyuwangi meraih penghargaan Pelayanan Prima (Kategori A) dari Kapolri atas kinerja penyelenggaran pelayanan publik tahun 2024. Kamis (19/6/2025). Penghargaan tersebut merupakan hasil dari PEKPPI (Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pelayanan Publik) yang dilakukan secara nasional.

Penghargaan ini menempatkan Polresta Banyuwangi sebagai salah satu satuan kerja kepolisian dengan standar layanan terbaik di lingkungan Polri. Kapolresta Banyuwangi, Komis Pol Rama Samtama Putra, S.I.K., M.Si., M.H., menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel atas dedikasi dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

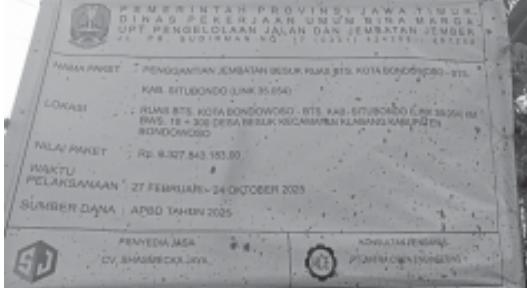
Namun demikian, Kapolresta Banyuwangi menegaskan bahwa pencapaian tersebut bukanlah akhir, melainkan pijakan untuk terus berbenah. "Tolak ukur pelayanan prima adalah sejauh mana masyarakat merasa puas, merasakan manfaat langsung, dan mendapat kemudahan dalam setiap urusan. Ini harus menjadi komitmen bersama," ujar Kapolresta.

Lebih lanjut, Kombes Pol. Rama Santama Putra menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan secara konsisten dan humanis, sejalan dengan semangat Polri yang Presisi.

Capaian ini menjadi bukti bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat bukan hanya dalam konteks penegakan hukum, tetapi juga sebagai pelayan publik yang adaptif dan akuntabel. Ke depan, Polresta Banyuwangi akan terus berinovasi dalam memperkuat kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang cepat, transparan, dan berintegritas.

(Dj/Swd)

## Antrian Kendaraan di Bondowoso Mengular Akibat Proyek Jembatan Besuk Rp 6,3 M



BONDOWOSO, BN - Tersendatnya arus lalu lintas cukup signifikan, disinyalir terjadi setiap hari di jalan raya penghubung antar Kabupaten Situbondo-Bondowoso akibat proyek penggantian jembatan yang saat ini dikerjakan oleh CV Shasmecka Jaya. Rabu, (18/6/2025).

Dampak antrian kendaraan yang berlokasi di Desa Besuk, Kecamatan Klabang, itu terlihat mengular. Sebab, kegiatan yang menghabiskan anggaran senilai Rp 6,3 miliar tersebut menggunakan sistem buka tutup dengan satu jalur secara bergantian.

SM, seorang pengendara motor, menyampaikan kepada awak media bahwa tersendatnya lalu lintang pengendara mulai terjadi sejak pagi hari dan berlangsung hingga sore. "Banyak dari mereka terjebak dalam antrian, yang menyebabkan ketidaknyamanan, ungkapnya. Menurut SM, meskipun pihak penyedia jasa telah memasang rambu-rambu peringatan dan pengalihan jalan, namun nampaknya tidak cukup untuk menghindari tumpukan kendaraan.

Karenanya, SM berharap agar kegiatan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini dapat segera diselesaikan dengan tepat waktu. Itu dilakukan, untuk menghindari antrian yang berkepanjangan. Sekedar diketahui, bahwa proyek pembangunan jembatan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Jember yang diambil dari APBD tahun 2025 tersebut, dimonitoring langsung oleh konsultan pengawas PT Mitra Cipta Engineering (MCE). (Agung Ch)

# Gubernur Khofifah Gelontorkan Bansos Rp 6,37 M di Kabupaten Pamekasan

PAMEKASAN, BN - Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indah Parawansa menggelontorkan Bantuan Sosial (Bansos) sebesar 6,37 Miliar untuk warga pra sejahtera di kabupaten Pamekasan. Adapun bantuan tersebut diberikan secara simbolis oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indah Parawansa yang didampingi oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemprov Jatim Restu Novi Widiani yang berlangsung di pendopo Agung Ronggokuwatu Pamekasan, Minggu 15/6/2025

Dalam sambutannya bupati Pamekasan Drs Kholilurrahman SH, Msi menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemprov Jatim yang telah memberikan perhatian khusus terhadap daerahnya. Sedangkan bantuan itu menjadi penyemangat pemerintah daerah untuk senantiasa meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. "Saya atas nama pemerintah kabupaten Pamekasan dan masyarakat menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya Ibu gubernur bersama rombongan di tempat kami. Semoga bantuan ini menjadi motivasi kita semua untuk meningkatkan lintas sektor mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat," ungkapnya.

Dikatakan, selain bantuan untuk masyarakat pra



Gubernur Khofifah secara simbolis menggelontorkan Bantuan Sosial (Bansos) sebesar 6,37 Miliar untuk warga pra sejahtera di kabupaten Pamekasan. (ist)

sejahtera tersebut Pemprov Jatim juga menyalurkan bantuan khusus melalui program Jatim Puspa yang bertujuan untuk memberdayakan usaha perempuan, khususnya untuk keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah graduasi dari Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, Pemprov Jatim juga menggelontorkan bantuan kepada pemerintah desa untuk pemberdayaan Badan Usaha Milik desa (Bumdes). Program tersebut akan menjadi pelecut semangat dalam meningkatkan pengabdian kepada masyarakat di daerahnya. "Dengan adanya Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ini, saya berharap terhadap kepala desa semakin berlomba-lomba untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat dan memajukan desanya bersama masyarakat sesuai dengan potensi desa yang dimilikinya," harapnya.

Perlu diketahui adapun bantuan sosial yang diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indah Parawansa pada kesempatan itu berupa Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASDP), Lansia, (PKH Plus), KIP Putri Jawa, bantuan pendamping PKH Plus, bantuan program pemberdayaan Bumdes, Jatim Puspa serta tali asih bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana). (Kholis)

## Bupati Kholilurrahman Launching Program Layanan Paduka di Kecamatan Waru

PAMEKASAN, BN - Bupati Pamekasan Drs Kholilurrahman, SH, Msi didampingi wakil bupati Pamekasan Sukriyanto bersama sekretaris daerah (Sekda) Masrukun S.sos, Msi dan Plt Kepala Disdukcapil Drs Saudi Rahman serta kepala OPD se- kabupaten Pamekasan melaunching program Pelayanan Administrasi Kependudukan Kecamatan (PADUKA) yang bertempat di kantor kecamatan Waru kabupaten Pamekasan, Selasa 17/6/2025.

Sedangkan program PADUKA tersebut merupakan salah satu program 100 hari kerja bupati dan wakil bupati Pamekasan Kholilurrahman - Sukriyanto yang di prakarsai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten Pamekasan.

Menurut bupati Pamekasan Drs Kholilurrahman, SH, Msi mengatakan, dokumentasi kependudukan meru-

pakan salah satu hak warga negara yang wajib difasilitasi oleh negara. Hal itu sebagai bentuk pengakuan negara terhadap rakyatnya dalam dokumen yang sah. Sebab dokumen-dokumen kependudukan kini sudah menjadi dasar dari seluruh pelayanan publik seperti halnya, anak kita mau masuk sekolah, tentunya butuh akte kelahiran KK, dan KIA.

Kemudian juga ketika kita butuh layanan kesehatan seperti BPJS, maka pasti butuh KTP elektronik, KK maupun dokumen kependudukan lainnya. Oleh itu dalam program 100 hari kerja pihaknya berkomitmen untuk lebih meningkatkan dan memudahkan pelayanan kependudukan bagi masyarakat Pamekasan, khususnya masyarakat wilayah utara dengan program PADUKA tersebut.

"Sebagai warga negara hak-hak kita dilindungi oleh negara. Ketika lahir kita



Bupati Kholilurrahman saat Launching Program Layanan Paduka di Kecamatan Waru.

memperoleh akte kelahiran, kemudian seiring bertambahnya usia dibuatkan Kartu Identitas Anak (KIA), KTP bahkan setelah meninggal pun kita dibuatkan dokumen kematian," ungkapnya.

Kholilurrahman juga menambahkan peluncuran program PADUKA tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah kabupaten bagi masyarakat wilayah utara untuk mengurus dokumen kependudukan

dengan mudah, cepat dan efisien. Sebab, jarak tempuh mereka ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil di Mall Pelayanan Publik (MPP) Pamekasan cukup jauh sehingga butuh waktu dan tenaga serta biaya. Oleh karena itu perlu dilakukan oleh pemkab Pamekasan untuk mempermudah dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di wilayah utara tersebut. (Kholis)

## Bupati Kunjungi Rutan Kelas IIB Sumenep

SUMENEP, BN - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sumenep dikunjungi Kepala Daerah Kabupaten Sumenep H. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH, Msi dalam kunjungannya disambut penghargaan oleh Kepala lapas dan jajarannya. Dalam hal itu bisa memberikan semangat kepada semua personil lembaga Lapas agar bekerja sesuai aturan Kemenhumham RI

Heri Sutriadi Kepala Rutan Kelas IIB Sumenep dalam pertemuan dengan Bupati Sumenep, memberikan hasil kinerja didalam tahanan dengan berbagai program pembinaan yang sudah dilakukan. Yaitu dari pelatihan keterampilan kerja, pembinaan rohani, hingga kegiatan sosial sebagai bagian dari upaya membentuk karakter warga binaan. Semua program itu ditujukan untuk membekali para narapidana agar kelak mampu kembali ke tengah-tengah masyarakat bisa bekerja secara mandiri, berakhlaq mulia juga membantu masyarakat yang membutuhkan.



Bupati Sumenep H. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH, Msi saat mengunjungi Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sumenep.

Atas pemberitahuan kepala lapas diatas kepada Bupati Fauzi, maka beliau mengapresiasi inisiatif tersebut dengan tidak mengurangi kejemuhan selalu banyak berkarya orang-orang yang terjerat hukuman di lapas Sumenep. "Pembinaan untuk masa depan pribadi dan keluarganya dalam hal untuk mengurangi kriminalitas dan tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama dan pemerintah, sehingga warga binaan harus memiliki potensi bisa berkonsolidasi tepat sasaran," kata Bupati.

Diakhir pertemuan dalam ramah tamah suasana penuh kesejukan, keakraban dan penuh keluargaan. Harapan bupati untuk selanjutnya jangan putus komunikasi dan selalu merancang program kolaboratif yang terukur demi mendorong kemajuan sistem kemasyarakatan dan pembangunan dengan adaptasi perkembangan jaman, agar tetap tidak ketinggalan.

(yus)

## Pemerintah Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam

1 Muharram 1447 H / 27 Juni 2025

WAHYU ADITYA PRANATA

Kepala Desa



## Bereliminasi Ciptakan Iklim Kompetitif Yang Konstruktif Bersama Insan Pendidik Penuh Dedikasi



Kasek UPT SD Negeri Driyorejo. (SA)

GRESIK, BN - Peperatah Jawa mengatakan "Putie Beras Gak Teko Deplukan Tapi Teko Gesekan Sak Konco Kancane". Berlandaskan filosofi itulah maka iklim kompetitif sengaja penulis ciptakan, sekaligus menjadi misi besar dalam mengejawantahakan peran dan fungsi sebagai personal pers media, beraksaraan guna dapat memenuhi tuntutan perkembangan era.

Merebaknya lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang kontrol sosial, serta telah menjadi kepastian pula bahwa arus penetrasi personalitiya tumpah-tulah membarengi, hingga mengakibatkan lajunya roda penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai pemerintahannya, dalam catatan dan pengamatan penulis perlu perhatian khusus.

Menanggapi akan hal itu, pada kesempatan ini penulis yang berprofesi sebagai awak media Cetak & Online Bidik Nasional akan menuangkan segala apa yang telah diperoleh dilapangan saat dan dalam menjalankan tugas-tugas pokok jurnalistik beserta kewartawannya. Bertujuan memperkaya referensi khasanah berbingkai kebebasan beraksaraan, sebagai cara dalam turut berkontribusi sosial, yakin dalam berpikir objektif, rasional yang cerdas dalam berakurasi, presisi dalam berpikir seberapa penting dan prioritasnya neraca problematika.

Berbekal sekelumit pernyataan dari sang Kepala Sekolah (Kasek) UPT SD Negeri, sebagai materi dasar dalam mengungkapkan seluruh peristiwa yang telah dialami dan dilalui oleh penulis. Berautodidak observatif, beranalisa yang elaboratif berharap mampu menggenapi jika hal itu menjadi syarat mutlak dalam mempertanggungjawabkan karya. Fundamental, elementer dan komplementer berpadu dalam resources akademik dan ilmiah entitas figur jati diri.

Ya memang setiap harinya seperti ini, silih berganti dan keluar masuk para tamu yang datang, ucap Kasek sekaligus mengawali percakapan sebagai respon jawaban pertanyaan dari awak media, seraya mempersilahkan duduk kepada kita berdua.

Proses rekayasa agar berhasil ditemui oleh seorang pejabat, via telepon menghubunginya apakah berkenan untuk menemui bila saatnya nanti kami akan berkunjung, "Berniat sowan atau bertema silaturrahmi", tidak munafik, dengan harapan akan mendapatkan secepat tradisi yang bukan prinsipal dan fundamental. Lamat-lamat terdengar suara perempuan yang mempersilakan untuk datang kekantornya, maka refleksi asumsi mengkonstruksi rasa respect dan penghormatan yang seakan berlebih atau istimewah dari beliaunya, kepada kita para personal awak media.

Sebagai catatan, adalah prinsip bagi penulis yaitu pantang berkomunikasi liwat udara terhadap siapapun jika dirasa hal itu tidaklah sangat penting, bukan sok suci namun sangat berpengaruh pada moralitas, bisa merusak hubungan persaudaraan. Etika formal dan non formal adalah segalanya bagi penulis, mengingat bukan hanya dasar teknis dalam menjalankan tugas, etika adalah sekaligus menjadi nilai jual yang tak ternilai harganya, etika adalah parameter hubungan kedekatan dengan siapapun dan apapun.

Etika, adalah dasar dan inti dari pada tujuan penciptaan manusia. Etika atau kode etik jurnalistik adalah tidak hanya menjadi syarat dan/atau kewajiban mutlak yang harus dipatuhi pada saat menjalankan profesi sebagai wartawan atau journalist.

Bukankah sempurna akhlak adalah manifestasi dari value tertinggi dari butiran-butiran sila yang tertuang di dalam dasar negara kita yaitu Pancasila.

Bereliminasi edukator, seperti para guru dan kepala sekolahnya. Etika, adalah perisai dalam membentengi martabat, harga diri dan/atau integritas. Bertaruh dan bertarung kualitas akademik dan kuantitas ilmiah antar sesama penyandang profesi telah menjadi makanan sehari-hari bagi para jurnalisme.

Pejabat publik, bersumber dari latar belakang akademisnya terlingkupi kesadaran serta kewaspadaan dalam menjaga performanya, senantiasa sengaja atau dibuat-buat. Saling menjaga kehormatan dan harga diri antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, menjadikan hikmah tauladan yang dapat dipetik.

Dan juga skalus menjadi keharusan baginya yaitu para pejabat publik yakni turut bertanggung jawab terhadap komunitas dan lingkungannya, khususnya dalam hal moralitas, hal itu adalah sebagai bentuk tuntutan bagi mereka yang beralmarlamater.

Lantas bagaimana dengan kita atau mereka yang mengatasnamakan dirinya sebagai person atau lembaga kontrol sosial, berbasis autodidak ? Bila dalam catatan penulis bedasarkan aduan para mitra kerja atau sumber yang sangat terpercaya bahwa masih banyak yang menyalagunakan peran dan fungsinya dengan cara yang sangat tidak bermoral ?, berangkat dari situlah artikel ini.

Tampak permandangan padatnya tamu yang hadir pada pagi menjelang siang, Kamis (12/6/2025), sekitar pukul 9.30 WIB, di kantor Kasek UPT SD Negeri wilayah Driyorejo. Bergegas dan tanggap entitas responsibility tinggi dari seorang Kasek, pejabat fungsional kabupaten Gresik. Menerima serta mempersilakan seluruh yang datang dan hadir untuk duduk dan menikmati suguhan termasuk kita awak media. Seketika rasa canggung, enggan hati dan sangat segan memulai percakapan, oleh karena beliaunya meninggalkan sementara tamu yang berada dalam diruangan kerjanya hanya demi menemui kita, Maa Syaa Alloh.

Konsolidasi, mengingat kali pertama awak media Bidik Nasional bertemu dengan Kasek UPT SD Negeri wilayah Driyorejo, penawaran kerja sama kemitraan spontan langsung didisposisi, tentu sangatlah kooperatif. Jika sumber sikap itu adalah kedekatan komunikasi sebelumnya, maka izinkan penulis berpersepsi yang berbeda, demi untuk menyususun catatan-catatan informasi melalui kata-kata agar menjadi sebuah kalimat yang bernarasi sebagai naskah artikel, tersaji dalam ruang publik dengan besar harapan dapat diterima sebagai karya intelektual jurnalistik, adalah rutinitasnya.

Motif karakter yang sangat tentu berdedikasi, dedikasi adalah kepercayaan yang diperoleh dari amanahnya kita dalam menjalankan tugas dan/atau perkerjaan, hampir seluruh tamu yang hadir beliau sempatkan untuk menemuinya dengan serta merta mempersilakan duduk sembari menunggu.

Sudah pasti pembaca bisa membayangkan bagaimana perasaan anda jika berada diposisi kami, seakan-akan tamu prioritas. Mengarahkan percakapan dengan kesan penting dan sangat mendalam, jika tujuan dan prinsip pendidikan berkiblat pada Unesco jelas menurut penulis jika mengutip sebuah pernyataan dari seorang rektor atau mantan menteri pendidikan bahwa potret penyelenggara pemerintah saat ini adalah hasil dari proses pendidikan 25 tahun yang lalu, apakah sudah dapat dikatakan berhasil ?.

Konsep pendidikan Unesco atau Barat bila pada umumnya yang kita pahami adalah menggabungkan antara IQ, SQ dan EQ. Realitasnya, adalah dunia saat ini dari semua aspek dan lini kehidupan telah berhasil mereka kuasai, ralat dan koreksi jika keliru.

Oleh karena itu, sebagai blance atau penyeimbang keberlangsungan alam semesta yang secara kodrat diciptakan berpasang-pasangan, maka kita harus yakin dan lebih mantap dengan prinsip dasar dan tujuan dari pada penyelenggaraan pendidikan kita yakni bangsa Timur, berdiri diatas pondasi filosofis Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani, ucapan awak media kepada Kasek.

Dialektika percakapan berkesan tergop-gopo atau tergesa, sangat kental terasa pada percakapan yang berlangsung dengan Ibu Kasek, mengingat sangatlah buanyak tamu yang menunggu, akhirnya beberapa point kesimpulan kita dapat, dari kami awak media jika pada kesempatan pertemuan berikutnya adalah membahas tentang Human Personality dan Human Dikti beserta kaitannya.

Konsolidasi yang utuh dari pada unsur-unsur komponen negara, kerja sama yang komprehensif antara elemen bangsa, soliditas yang konstruktif pada semua organisasi-organisasi yang ada, baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah, demokratis dalam menyelesaikan masalah, adil individu atau terhadap diri sendiri terlebih adil dan merata bagi segenap tumpah darah Indonesia, prolog komunikasi tekstual adalah prinsipnya.

Dialektis nuansa percakapan, sesekali komunikasi dihiasi dengan logat kental daerah, mengungkap sekilas tentang performen Ibu Kasek UPT SD Negeri wilayah Driyorejo, senyum riang gembira senantiasa menghiasi wajah parasya, bahkan nyaris tak nampak

■ Bersambung ke hal.11 kol.5

# Kalapas Purwodadi Dampingi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Kunjungan di Lapas Terbuka Kendal



Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto Didampingi Kalapas Purwodadi Erik Murdiyanto ber kunjungan ke Lapas Terbuka Kendal (Foto: ist)

**GROBOGAN, BN** – Kalapas Purwodadi ikut ambil bagian dan mendampingi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berkunjung ke Lapas Terbuka Kendal. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung program-program yang berjalan sebagai bagian dari Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Selasa (17/6).

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Agus Andrianto bersama Direktur Jemimpas memberikan man-

deral Pemasyarakatan, disambut oleh Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Tengah dan Kakanwil Ditjen Imigrasi Jawa Tengah, serta jajaran Kepala UPT Pemasyarakatan Jawa Tengah termasuk Kalapas Purwodadi, Erik Murdiyanto.

Warga Binaan yang dapat mengikuti program ini adalah mereka yang telah menjalani 2/3 masa pidana dan sedang mengikuti proses asimilasi jelang pembebasan atau pembebasan bersyarat.

“Kami mendorong agar para Warga Binaan mendapat manfaat keuangan dari program ini dan digunakan sesuai kebutuhan, seperti untuk keperluan pribadi, keluarga, maupun tabungan,” ujar Menteri Agus.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah, Mardi Santoso, menjelaskan hasil penjualan jagung akan dibagi 60 persen untuk Lapas dan 40 persen menjadi ta-

bungan Warga Binaan. “Untuk harga jual, kami sesuaikan dengan harga pasar agar produk kami tetap memiliki daya saing,” terangnya.

Salah seorang Warga Binaan yang mengikuti panen raya tersebut mengaku memperoleh keuntungan sebesar Rp 300.000,- dari hasil penjualan jagung, sementara Warga Binaan lainnya bahkan mendapatkan hingga Rp 500.000,-. “Dana tersebut saya gunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarga,” ungkapnya.

Ketahanan pangan merupakan salah satu dari 13 program akselerasi strategis yang digagas Menimipas. Pada poin ketiga, ditekankan pentingnya penguatan dan peningkatan pendayagunaan Warga Binaan untuk menghasilkan produk-produk UMKM bernali ekonomi. Diharapkan program ketahanan pangan ini terus berjalan dan memberikan manfaat baik bagi para pelakunya. (Heru Budianto)

## Kapolres Grobogan Ike Yulianto Kukuhkan Tiga Jabatan Utama dan Kaporsek



Kapolres Grobogan Ike Yulianto Saat Pimpin Sertijab (Foto: ist)

**GROBOGAN, BN** – Sebagai bagian dari dinamika organisasi Polri, Polres Grobogan melaksanakan rotasi sejumlah Pejabat Utama (PJU) dan Kaporsek jajaran. Sebanyak tiga jabatan utama dan tiga jabatan Kaporsek secara resmi dilantik dan diserah terimakan dalam prosesi serah terima jabatan (sertijab) yang dipimpin oleh Kapolres Grobogan AKBP Ike Yulianto di halaman Mapolres setempat pada Jum'at (23/5/2025).

Para pejabat utama Polres Grobogan yang dilantik untuk menduduki jabatan baru diantaranya yakni Kabag SDM Polres Grobogan AKP Lamsir yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai Kasubbag Watpers.

Kemudian, Kasi Humas AKP Danang Esanto selanjutnya menggantikan amanah baru sebagai Kaporsek Pulokulon dan Iptu Sartono yang sebelumnya menjabat sebagai Ka SPKT selanjutnya menduduki jabatan sebagai Kaporsek Tawangharjo.

Kasat Resnarkoba Polres Grobogan yang sebelumnya dijabat oleh AKP Eko Bambang Eko Nurtjahjo, kini diserah terimakan kepada AKP Dedy Setyanto yang sebelumnya merupakan Kaporsek Purwodadi. AKP Eko Bambang selanjutnya akan menduduki jabatan baru sebagai Kasat Resnarkoba Polres Demak.

Untuk jabatan Kaporsek Purwodadi selanjutnya akan dijabat oleh AKP Siswanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubbag Bekpal Polres Grobogan. Dalam amanatnya, Kapolres Grobogan menegaskan bahwa mutasi merupakan hal yang lumrah dan menjadi bagian dari pembinaan karier serta penyegaran dalam tubuh organisasi.

Ia menekankan bahwa setiap jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Tidak hanya kepada institusi, namun juga kepada masyarakat, bangsa dan Tuhan Yang Maha Esa. “Saya harap kepercayaan yang telah diberikan oleh pimpinan dapat dijaga dan dilaksanakan sebaik-baiknya,” ujar Kapolres Grobogan.

Dalam kesempatan itu, AKBP Ike Yulianto menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama khususnya Kasat Resnarkoba AKP Eko Bambang yang selama mengabdi di Polres Grobogan dapat melakukan berbagai pengungkapan kasus narkotika sehingga berhasil memberikan dampak yang cukup signifikan untuk mendukung salah satu Asta Cita Presiden Republik Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Grobogan.

(Heru Budianto)

Kemudian, Kasi Humas AKP Danang Esanto selanjutnya menggantikan amanah baru sebagai Kaporsek Pulokulon dan

Iptu Sartono yang sebelumnya menjabat sebagai Ka SPKT selanjutnya menduduki jabatan sebagai Kaporsek Tawangharjo.

Kasat Resnarkoba Polres Grobogan yang sebelumnya dijabat oleh AKP Eko Bambang Eko Nurtjahjo, kini diserah terimakan kepada AKP Dedy Setyanto yang sebelumnya merupakan Kaporsek Purwodadi. AKP Eko Bambang selanjutnya akan menduduki jabatan baru sebagai Kasat Resnarkoba Polres Demak.

Untuk jabatan Kaporsek Purwodadi selanjutnya akan dijabat oleh AKP Siswanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubbag Bekpal Polres Grobogan. Dalam amanatnya, Kapolres Grobogan menegaskan bahwa mutasi merupakan hal yang lumrah dan menjadi bagian dari pembinaan karier serta penyegaran dalam tubuh organisasi.

Ia menekankan bahwa setiap jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Tidak hanya kepada institusi, namun juga kepada masyarakat, bangsa dan Tuhan Yang Maha Esa. “Saya harap kepercayaan yang telah diberikan oleh pimpinan dapat dijaga dan dilaksanakan sebaik-baiknya,” ujar Kapolres Grobogan.

Dalam kesempatan itu, AKBP Ike Yulianto menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama khususnya Kasat Resnarkoba AKP Eko Bambang yang selama mengabdi di Polres Grobogan dapat melakukan berbagai pengungkapan kasus narkotika sehingga berhasil memberikan dampak yang cukup signifikan untuk mendukung salah satu Asta Cita Presiden Republik Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Grobogan.

(Heru Budianto)

Kemudian, Kasi Humas AKP Danang Esanto selanjutnya menggantikan amanah baru sebagai Kaporsek Pulokulon dan

**Proyek Bronjong Sungai Panusupan Rampung, Warga Ucapkan Terima Kasih Kepada BBWS Citanduy**



**BANJAR, BN** – Pekerjaan pemasangan bronjong di aliran Sungai Panusupan, wilayah Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir, telah selesai dilaksanakan dengan baik. Proyek ini bertujuan untuk mencegah longsor serta menjaga kestabilan tebing sungai, khususnya saat musim penghujan.

Pelaksanaan pembangunan bronjong dilakukan oleh Iyan, pelaksana asal Cipo-

roan, Kecamatan Banjarsari. Pekerjaan tersebut berjalan lancar hingga tahap akhir, memberikan dampak positif terhadap kenyamanan dan keselamatan masyarakat sekitar aliran sungai.

Masyarakat Desa Lumbir menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy, khususnya kepada Seksi Operasi dan Pemeliharaan

membantu kami. Sekarang kami lebih tenang saat musim hujan datang,” ujar salah satu warga setempat.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat demi pembangunan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi warga. (Asep Sujana)

“Alhamdulillah, pembangunan bronjong ini sangat

memudahkan kami. Sekarang kami lebih tenang saat musim hujan datang,” ujar salah satu warga setempat.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat demi pembangunan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi warga. (Asep Sujana)

membantu kami. Sekarang kami lebih tenang saat musim hujan datang,” ujar salah satu warga setempat.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat demi pembangunan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi warga. (Asep Sujana)

“Alhamdulillah, pembangunan bronjong ini sangat

memudahkan kami. Sekarang kami lebih tenang saat musim hujan datang,” ujar salah satu warga setempat.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat demi pembangunan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi warga. (Asep Sujana)

“Alhamdulillah, pembangunan bronjong ini sangat

memudahkan kami. Sekarang kami lebih tenang saat musim hujan datang,” ujar salah satu warga setempat.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat demi pembangunan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi warga. (Asep Sujana)

“Alhamdulillah, pembangunan bronjong ini sangat

memudahkan kami. Sekarang kami lebih tenang saat musim hujan datang,” ujar salah satu warga setempat.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat demi pembangunan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi warga. (Asep Sujana)

“Alhamdulillah, pembangunan bronjong ini sangat

memudahkan kami. Sekarang kami lebih tenang saat musim hujan datang,” ujar salah satu warga setempat.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat demi pembangunan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi warga. (Asep Sujana)

“Alhamdulillah, pembangunan bronjong ini sangat

memudahkan kami. Sekarang kami lebih tenang saat musim hujan datang,” ujar salah satu warga setempat.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat demi pembangunan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi warga. (Asep Sujana)

“Alhamdulillah, pembangunan bronjong ini sangat

memudahkan kami. Sekarang kami lebih tenang saat musim hujan datang,” ujar salah satu warga setempat.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat demi pembangunan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi warga. (Asep Sujana)

“Alhamdulillah, pembangunan bronjong ini sangat

memudahkan kami. Sekarang kami lebih tenang saat musim hujan datang,” ujar salah satu warga setempat.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat demi pembangunan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi warga. (Asep Sujana)

“Alhamdulillah, pembangunan bronjong ini sangat

memudahkan kami. Sekarang kami lebih tenang saat musim hujan datang,” ujar salah satu warga setempat.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat demi pembangunan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi warga. (Asep Sujana)

“Alhamdulillah, pembangunan bronjong ini sangat

memudahkan kami. Sekarang kami lebih tenang saat musim hujan datang,” ujar salah satu warga setempat.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat demi pembangunan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi warga. (Asep Sujana)

“Alhamdulillah, pembangunan bronjong ini sangat

memudahkan kami. Sekarang kami lebih tenang saat musim hujan datang,” ujar salah satu warga setempat.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat demi pembangunan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi warga. (Asep Sujana)

“Alhamdulillah, pembangunan bronjong ini sangat

memudahkan kami. Sekarang kami lebih tenang saat musim hujan datang,” ujar salah satu warga setempat.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat demi pembangunan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi warga. (Asep Sujana)

“Alhamdulillah, pembangunan bronjong ini sangat

memudahkan kami. Sekarang kami lebih tenang saat musim hujan datang,” ujar salah satu warga setempat.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat demi pembangunan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi warga. (Asep Sujana)

“Alhamdulillah, pembangunan bronjong ini sangat

memudahkan kami. Sekarang kami lebih tenang saat musim hujan datang,” ujar salah satu warga setempat.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat demi pembangunan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi warga. (Asep Sujana)

“Alhamdulillah, pembangunan bronjong ini sangat

memudahkan kami. Sekarang kami lebih tenang saat musim hujan datang,” ujar salah satu warga setempat.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat demi pembangunan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi warga. (Asep Sujana)

“Alhamdulillah, pembangunan bronjong ini sangat

memudahkan kami. Sekarang kami lebih tenang saat musim hujan datang,” ujar salah satu warga setempat.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat demi pembangunan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi warga. (Asep Sujana)

“Alhamdulillah, pembangunan bronjong ini sangat

memudahkan kami. Sekarang kami lebih tenang saat musim hujan datang,” ujar salah satu warga setempat.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat demi pembangunan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi warga. (Asep Sujana)

“Alhamdulillah, pembangunan bronjong ini sangat

memudahkan kami. Sekarang kami lebih tenang saat musim hujan datang,” ujar salah satu warga setempat.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat demi pembangunan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi warga. (Asep Sujana)

“Alhamdulillah, pembangunan bronjong ini sangat

memudahkan kami. Sekarang kami lebih tenang saat musim hujan datang,” ujar salah satu warga setempat.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat demi pembangunan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi warga. (Asep Sujana)

# UPT BLK Kediri Gandeng IKA PMII Gelar Pelatihan Servis Sepeda Motor di Wonodadi Blitar



Pelatihan servis sepeda motor sistem injeksi yang digelar BLK Kediri di Sekretariat IKA PMII Dusun Wonodadi, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Rabu (21/5/2025). Tampak peserta sangat senang dan antusias mengikuti pelatihan (Foto: ist)

BLITAR, BN - BLK Kediri melaksanakan pelatihan servis sepeda motor sistem injeksi berlangsung di Sekretariat IKA PMII Dusun Wonodadi, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur,

Rabu (21/5/2025). Peserta pelatihan servis sepeda motor diikuti 16 peserta warga Wonodadi Kabupaten Blitar.

Pelatihan servis sepeda motor sistem injeksi dimulai 29 April hingga 6 Juni 2025, Senen sampai Sabtu aktif masuk waktu pelaksanaan jam 08.00 - 15.00 wib.

Arifin selaku Instruktur Teknik Sepeda Motor (TSM) dari BLK Kediri menyampaikan untuk pelatihan servis sepeda motor bagi peserta dari Wonodadi Blitar diajarkan sesuai 17 unit kompetensi dengan dibekali untuk motor matic bagian cvd dan overfull engine konvensional serta sistem pengapian CDI. "Jadi di luar topik injeksi tetap kita bekali semua peserta di Wonodadi," ucap Arifin.

Lanjut Arifin selain itu kita bekali

pengenalan komponen-komponen yang ada di sistem injeksi baik genser maupun akutator. Pengenalan cara kerja sistem injeksi dan pengenalan scanner atau diagnostik stolnya untuk motor injeksi.

"Selanjutnya, untuk di Wonodadi kita bekali juga untuk overfull engine konvensional mengenai transmisi, kopling, pengapian, priston, mekanisme katub itu kita ajarkan. Itu yang membedakan pelatihan-pelatihan yang ada di luar," ujarnya.

Ditambahkan Arifin bahwa kebetulan ini program NPU tapi dibekali uji kompetensi. Jadi ada uji kompetensinya dari BNSP. "Nanti setelah selesai pelatihan selama 35 hari, akan ada uji kompetensi sesuai dengan skema, yaitu servis sepeda motor sistem

injeksi 17 unit kompetensi yang diujikan," imbuhnya.

Arifin menuturkan setelah peserta mendapatkan pelatihan disini untuk peluang kerja ada sekitar 60 persen, ada yang buka bengkel sendiri dan melanjutkan bengkel milik orang tuanya. "Saya berharap anak-anak bisa sukses semua dan tentunya peningkatan ekonomi bisa lebih bagus," harapnya.

Sementara, salah satu peserta Burhan warga Desa Pitakan Kecamatan Wonodadi Blitar mengaku ikut pelatihan servis sepeda motor disini ingin menambah skillnya. "Dan rencananya ingin mengikuti kegiatan di bengkel untuk menambah ilmunya agar bisa berkembang dan membuka wirausaha sendiri," ujar Burhan.

(adv/red)

## Lulus 100%, Tasyakuran SDN Kedung Baruk Surabaya Digelar BIDIK NASIONAL, Sederhana Penuh Makna



Para murid, orangtua murid, guru pengajar, Kepala Sekolah SDN Kedung Baruk 1 Surabaya tampak gembira karena lulus 100%. (red)

**LEMBAGA BANTUAN HUKUM/KANTOR HUKUM BIDIK NASIONAL**  
Jl. Ikan Lele II Blok C-i No 14, Perumahan Bluru Permai, Desa Bluru Kidul, Kecamatan Kota Sidoarjo, Kab Sidoarjo, Jawa Timur  
Telp: 031-99728729, 08123209649, 081330779927, Email: bidiknasional@yahoo.com, Website: www.bidiknasional.com  
Advokat: Yustinus Haryanto, SH, Drs Edy Sutanto, SH, Dkk

No : 003/LBH-V-2025/BN  
Lamp : 1 berkas  
Perihal : **SOMASI**

Kepada Yth,  
**Sdr. ABDUL MAJID**  
Desa Grogol RT 06 RW 04  
Kecamatan Dukusseti  
Kabupaten PATI  
Jawa Tengah

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini:

— Yustinus Haryanto, SH.  
— Drs Edy Sutanto, SH.  
— Nur Yahya, SH.  
— Teddy Syah Roni, SH.

Para Advokat dan Penasehat Hukum/Para Legal pada **Lembaga Bantuan Hukum/Kantor Hukum Bidik Nasional**, beralamat di Jl. Ikan Lele II Blok Ci No. 14, Perumahan Bluru Permai, Desa Bluru Kidul, Kecamatan Kota Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2025 bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan klien kami **MAFTUKHAN** Dkk (copy Surat Kuasa terlampir), menunjuk pada permasalahan yang dialami Pada Pemberi Kuasa, perkenankan dengan ini kami menyampaikan **SOMASI**, sebagai berikut :

1. Bahwa klien kami, **MAFTUKHAN**, dkk. sebanyak 7 (tujuh) orang, sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa, warga Perumahan Kemiri Indah/Grand Kemiri Residen/Perumahan Kemiri telah melakukan transaksi jual beli tanah dan bangunan secara dibawah tangan dengan Saudara, selaku **DEVELOPER CV ARSYIL PUTRA** pada sekitar tahun 2014 – 2015 ;
2. Bahwa sesuai kesepakatan klien kami berkewajiban melakukan pembayaran sebesar harga tanah dan bangunan yang ditentukan, sedangkan Saudara berkewajiban untuk menyelesaikan proses kepemilikan atas tanah dan bangunan dimaksud ;
3. Bahwa setelah klien kami memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran secara lunas, Saudara selaku Penjual tidak juga menitaskan kewajibannya, yakni mengurus penyelesaian SHM dan bangunan klien kami, bahkan sumpah dengan saat ini ;
4. Sesuai penjelasan salah seorang klien kami, bahwa Sertifikat Induk SHM tanah klien kami berada dalam penggunaan **Sdr. ARI ISTIQOMAH, S.H., Notaris di Sidoarjo** ;
5. Bahwa klien kami sudah berusaha-tuhan berusaha menelusuri keberadaan Saudara, namun tidak membahukan hasil ;

Sehubungan dengan permasalahan sebagaimana kami uraikan di atas, melalui **SOMASI** ini kami minta kepada Saudara dengan secara suka rela menemui kami guna menyelesaikan kewajiban Saudara dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan ini, dalam waktu selambat-lambatnya **10 (sepuluh)** hari sejak diterimanya Somasi ini, sebelum kami melaporkan Tindak Pidana yang terjadi, yakni **PENIPUAN** dan **PENGELAPAN** kepada Pihak KEPOLISIAN.

**LEMBAGA BANTUAN HUKUM/KANTOR HUKUM BIDIK NASIONAL**  
Jl. Ikan Lele II Blok C-i No 14, Perumahan Bluru Permai, Desa Bluru Kidul, Kecamatan Kota Sidoarjo, Kab Sidoarjo, Jawa Timur  
Telp: 031-99728729, 08123209649, 081330779927, Email: bidiknasional@yahoo.com, Website: www.bidiknasional.com  
Advokat: Yustinus Haryanto, SH, Drs Edy Sutanto, SH, Dkk

Demikian **SOMASI** ini kami sampaikan, atas segala perhatian dan kerja samanya kami ucapan terimakasih.

Sidoarjo, 03 Mei 2025

Hormat Kami

Kasa Hukum **MAFTUKHAN**, Dkk.

**YUSTINUS HARYANTO, SH.**

**Drs. EDY SUTANTO, SH.**

**NUR YAHYA, SH.**

**TEDDY SYAH RONI, SH.**

Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Di Sidoarjo ;
2. Yth. Kapolda Sidoarjo Di Sidoarjo ;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Di Sidoarjo ;
4. Yth. Ketua Majelis Pengawas Notaris Republik Indonesia Duaerah Sidoarjo Di Sidoarjo ;
5. Yth. Kepala Badan Petyanahan Kabupaten Sidoarjo Di Sidoarjo ;
6. Yth. Sdr. ARI ISTIQOMAH, S.H., Notaris Di Sidoarjo
7. Arsip ✓



Budi Santoso, Redpel Surat Kabar Bidik Nasional dan media online bidiknasional.com bersama Kepala Sekolah, orang tua murid dan para murid yang lulus.

menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan nasional. Pendidikan sebagai wahana utama pembangunan sumber daya manusia berpartisipasi dalam mengembangkan peserta didik menjadi sumber yang produktif dan memiliki kemampuan profesional dalam meningkatkan kualitas hidup berbangsa dan bernegara.

Sementara, disampaikan Kepala Sekolah SDN Kedung Baruk, Sri Istini dihadapan awak media bahwa, surprise diberikan oleh seluruh wali murid dalam bentuk syukuran tumpeng. "Demikian juga kami sebagai Kepala Sekolah mewakili seluruh jajaran pendidik menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada orang tua siswa, kami selalu menghargai keinginan yang bersifat positif yang tidak membebani siswa," ucap Bu Istini sapaan lekatnya.

Setelah ini kata dia, bagi orang tua yang ingin mendaftarkan putra-putrinya, penting untuk memahami tahapan, syarat, dan jadwal pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Informasi penting sekolah menengah wajib dipahami. Dengan mengenal sekolah lanjutnya diharapkan peserta didik menjadi didampingi orang tua dapat mengambil keputusan dengan tepat.

Untuk itu ungkapnya, terima kasih kepada orangtua siswa/i yang telah mempercayakan pihak sekolah mendidik anak-anak mereka hingga saat ini telah lulus dan bersiai melanjutkan ke jenjang berikutnya.

Ia pun menekankan pentingnya anak-anak lulusan SD ini melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. "Kami berharap orangtua harus memastikan anak-anak melanjutkan pendidikan dan meraih cita-cita mereka. Harapan kami, anak-anak didorong tetap belajar dan terus belajar untuk meraih kesuksesan mereka di masa yang akan datang," jelasnya.

Sebagai informasi, acara tasyakuran kelulusan siswa/i SDN Kedung Baruk tersebut didukung penuh oleh Forum Pimpinan Media Nasional Jawa Timur (Forpmnas Jatim) terdiri dari puluhan media koran dan media cyber, Gerakan Masyarakat Anti Narkoba (Gaman) Semeru Indonesia (GSI) salah satu relawan pugiat anti narkoba BNN RI, Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI), Forum Peserta Jaminan Sosial (FPJamsos) serta FIA AUDIO sound sistem pimpinan Bpk. Mustofa di Jl. Medokan Semampir Surabaya.

Selain tumpeng, acara diisi dengan pembagian Surat Keterangan Kelulusan (SKL), pengumuman siswa berprestasi terbaik 1, 2 dan 3 di setiap kelas 6 terdiri dari kelas A, B dan C, pagelaran sendra tari kecak dan paduan suara.

Beberapa sambutan diutarakan oleh Pengawas Sekolah Wilayah Kecamatan Rungkut, perwakilan Wali kelas 6, Ketua Komite SDN Kedung Baruk dan Perwakilan Siswa kelas 6.

Dalam kegiatan ini juga dipaparkan edukasi Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) usia dini oleh Yayasan Gaman Semeru Indonesia. Diakhir, acara ditutup dengan penjemputan siswa oleh orang tua wali murid. (red)

# Pemkab Lampung Barat Perkuat Ketahanan Pangan Melalui Berbagai Program

## □ Hi. Parosil Mabsus : Petani Adalah Ujung Tombak Ketahanan Pangan Bangsa

LAMPUNG BARAT, BN - Ditingkat tantangan krisis pangan global dan perubahan iklim yang mengancam stabilitas sektor pertanian, Kabupaten Lampung Barat justru menunjukkan kemajuan signifikan dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah. Hal ini tak lepas dari kepemimpinan visioner Bupati Hi. Parosil Mabsus yang terus mendorong inovasi, kolaborasi, dan keberpihakan nyata kepada para petani serta pelaku usaha tani lokal.

BUPATI Lampung Barat Hi. Parosil Mabsus menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan kesejahteraan petani dengan mengalokasikan bantuan alat pertanian kepada sejumlah kelompok tani yang ada di kabupaten Lampung Barat. Bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional.

Adapun bantuan yang disalurkan mulai dari mesin Handsprayer Tasco (HSP), mesin Combine Harvester yang berasal dari Kementerian Pertanian atas usulan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan Pemerintah Pro-

vinsi Lampung. Parosil Mabsus menyatakan, bahwa petani adalah ujung tombak ketahanan pangan bangsa.

Ia menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah pusat fokus memperkuat ketahanan pangan melalui berbagai program, termasuk bantuan alat pertanian, pembangunan irigasi, dan perbaikan akses jalan.

Parosil menyebutkan kabupaten Lampung Barat memiliki 11 ribu hektar lahan pertanian padi, oleh karena itu, ia meminta agar potensi pertanian ini dielola secara optimal dan di dampingi secara intensif oleh Penyuluh Pertanian Kabupaten Lampung Barat dan Pemerintah Pro-



Bupati Lampung Barat Hi. Parosil Mabsus saat membagikan bantuan alat-alat pertanian kepada petani saat panen raya di Kecamatan Balik Bukit. (ist)



Ia juga menekankan agar bantuan alat Combine Harvester yang sudah diterima dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para kelompok tani. Parosil berharap, bantuan alat pertanian lainnya juga bisa segera menyusul dari pemerintah pusat.

Salah satu perwakilan

penerima bantuan, Ahmad Rosidin, menyampaikan apresiasinya atas perhatian dan bantuan yang diberikan. "Kami ucapan terima kasih sekali atas bantuan dari Pemerintah. Mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia hingga akhirat," ucapnya.

Di bawah kepemimpinan Parosil Mabsus, pembangunan sektor pertanian di Lampung Barat tidak hanya terfokus pada peningkatan hasil produksi semata, tetapi juga pada keberlanjutan sistem pangan dari hulu ke hilir.

"Petani adalah pahlawan

pangan. Maka sudah menjadi kewajiban kami untuk memastikan mereka mendapat dukungan penuh," ujar Parosil dalam salah satu agenda panen raya di Kecamatan Balik Bukit.

Ucapan ini bukan sekadar retorika. Pro-

gram "Petani Berjaya" dan "Kartu Petani Berjaya" yang digagas pemerintah daerah menjadi bukti nyata keberpihakan pemimpin terhadap sektor paling mendasar dalam kehidupan masyarakat.

Lampung Barat juga menjadi kabupaten yang aktif mengintegrasikan teknologi pertanian berbasis data untuk meningkatkan efisiensi lahan dan produksi. Melalui kerja sama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi, pemerintah kabupaten berhasil memperkenalkan sistem pertanian presisi, penggunaan pupuk organik ramah lingkungan, serta sistem irigasi hemat air yang semakin diminati petani lokal.

Di sisi lain, Bupati Parosil juga tak lupa menyentuh aspek hilir melalui pembangunan sentra-sentra agroindustri di beberapa kecamatan. Hal ini bertujuan agar produk pertanian tak hanya dijual sebagai bahan mentah, melainkan diolah lebih lanjut untuk meningkatkan nilai tambah. Salah satunya adalah pengolahan kopi robusta Lampung Barat, yang kini telah menembus pasar nasional dan internasional.

Strategi ini bukan hanya menjaga kearifan lokal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada sektor paling mendasar dalam kehidupan masyarakat.

Lampung Barat juga menjadi kabupaten yang aktif mengintegrasikan teknologi pertanian berbasis data untuk meningkatkan efisiensi lahan dan produksi. Melalui kerja sama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi, pemerintah kabupaten berhasil memperkenalkan sistem pertanian presisi, penggunaan pupuk organik ramah lingkungan, serta sistem irigasi hemat air yang semakin diminati petani lokal.

## Bupati Parosil Mabsus Shalat Idul Adha dan Serahkan Qurban Presiden Prabowo di Kecamatan Air Hitam



Parosil Mabsus saat shalat Idul Adha 1446 Hijriyah sekaligus menyerahkan satu ekor sapi hewan Qurban Presiden Prabowo di Pekon Semarang Jaya Kecamatan Air Hitam, Jum'at 06/06/2025. (ist)

LAMPUNG BARAT, BN - Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus melaksanakan shalat Idul Adha 1446 Hijriyah sekaligus menye-

ralahkan satu ekor sapi hewan Qurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Pekon Semarang Jaya Kecamatan Air Hitam, Jum'at

06/06/2025. Sebelum menyerahkan hewan Qurban, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berupa satu ekor sapi jenis Simental seberat 810 KG, Parosil Mabsus terlebih dahulu melaksanakan shalat di masjid Jami Baiturrohman.

Seperti diketahui, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyurarkan 985 ekor sapi Qurban ke seluruh Provinsi dan Kabupaten/kota di Indonesia. Dalam hal ini termasuk Kabupaten Lampung Barat.

Sebelum melaksanakan Shalat Idul Adha Parosil Mabsus mengatakan, hari

raja Idul Adha bukan hanya tentang penyembelihan hewan Qurban, melainkan juga momentum untuk menggali nilai-nilai ihsan yang diajarkan oleh Rasulullah Shollallahu 'Alaihi Wasallam (SAW).

Menurutnya, Ibadah Qurban bukan sekadar ritual penyembelihan hewan, akan tetapi madrasah spiritual yang mengajarkan untuk menginternalisasikan sebuah nilai luhur dalam Islam, yaitu Ihsan.

"Idul Adha bukan hanya sekadar momen ritual penyembelihan hewan Qurban, tetapi juga menjadi waktu yang tepat untuk refleksi diri memeriksa sejauh mana seseorang telah berkorban, berbagi, dan berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari," terangnya.

Kemudian, saat mewakili Presiden Republik Indo-

nesia Prabowo Subianto menyerahkan hewan Qurban, Parosil Mabsus mengatakan pihaknya sengaja memilih sapi yang berasal asli dari Lampung Barat.

"Sebetulnya kita boleh cari sapi dari luar daerah Lampung Barat tapi sudah saya perintahkan kepada kepala dinas peternakan tidak boleh membeli sapi luar dari Lampung Barat, harus cari sapi yang memang asli dari Lampung Barat."

Disampaikan Parosil Mabsus, hal itu sengaja dilakukan untuk meningkatkan inspirasi dan semangat peternak Lampung Barat, "Jangan sampai tahun ini mengambil di peternakan pak Bambang tahun depan berkorban, berbagi, dan berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari," terangnya.

Dengan mendapatkan sapi hewan Qurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menye-



Prabowo Subianto, Parosil Mabsus berharap dapat ber-

rahkan satu ekor sapi hewan Qurban.

"Kami atas nama masyarakat Pekon Semarang Jaya menyampaikan terimakasih kepada bapak bupati yang sudah mewakili pak Presiden menyerahkan satu ekor sapi untuk Qurban. Semoga di tahun yang akan datang penyerahan hewan Qurban seperti ini tetap di lanjutkan," tutupnya. (Taufik/Adv)

## Percepat Pembangunan di Kabupaten Bogor, Bupati Rudy Lantik 25 Pejabat

BOGOR, BN-Bupati Bogor, Rudy Susmanto, melantik sebanyak 25 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, yang terdiri dari 22 pejabat struktural eselon III dan IV, serta 3 pejabat fungsional. Rudy menegaskan, pelantikan ini sebagai bagian dari upaya penguatan organisasi dan percepatan pelaksanaan



Bupati Bogor Rudy Susmanto saat melantik 25 Pejabat. (Emil)

pembangunan di Kabupaten Bogor.

Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat pengawas, pejabat administrator dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2025 dilaksanakan di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Selasa (17/6/2025).

Hadir Wakil Bupati Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Dandim 0621 Kabupaten Bogor, perwakilan Forkopimda, anggota DPRD, Ketua Pengadilan Agama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, para pimpinan perangkat daerah, serta perwakilan MUI.

Pelantikan hari ini telah mendapatkan izin

pengangkatan dan pelantikan dalam jabatan, dari Menteri Dalam Negeri berdasarkan surat Mendagri No.100.2.2.6/3341/Otda, tanggal 10 Juni 2025 tentang Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Total keseluruhan yang akan dilantik terdapat 126 orang, tahap pertama ada sebanyak 25 orang yang hari ini dilantik, yakni 22 orang pejabat eselon III dan IV, dan 3 orang pejabat fungsional. Sisanya akan dilantik pada tahap berikutnya karena sudah ada izin dari Mendagri. Bupati Bogor, Rudy Susmanto menyampaikan, pelantikan ini bukanlah yang terakhir, ia memastikan bahwa akan ada pelantikan lanjutan dalam beberapa waktu ke depan. Mutasi, rotasi, dan promosi adalah bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan struktural serta meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi. (emil)



Tahun Baru Islam 1447 H Semoga Warga Sidoarjo selalu dalam Keberkahan dan Bekerja Membangun Sidoarjo yang Adil Makmur

Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua  
H. Abdillah Nasib S.M. Suyarno, S.H., M.H. H. Kayan, SH Warih Andono, SH

## Bupati Labuhanbatu Tekankan Wajib Belajar 13 Tahun Setiap Anak di Seluruh Desa

LABUHANBATU, BN - Bupati Labuhanbatu, dr. Hj. Maya Hasmita, S.p. OG, M.K.M, menekankan kepada seluruh kepala Desa se Kabupaten Labuhanbatu agar mewajibkan seluruh masyarakatnya untuk mengikuti program wajib belajar 13 tahun yang telah dicanangkan pemerintah pusat maupun daerah.

Langkah tersebut dilakukan Bupati dalam rangka mewujudkan generasi emas Kabupaten Labuhanbatu yang cerdas, sehat dan berkarakter serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Desa titik khususnya pendidikan berkualitas.

Sebagai bentuk percepatan kesuksesan program pemerintah tersebut, Bupati Labuhanbatu melakukan MOU dengan seluruh kepala desa dan Lurah yang ada di Kabupaten labuhanbatu serta kepala sekolah PAUD/TK dan RA yang diselenggarakan di ruang data dan karya Kantor Bupati labuhanbatu Jalan SM Raja, Rantauprapat, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Selasa 17/6/2025.

Menurut Bupati upaya ini tidak akan maksimal tanpa dukungan dan peran aktif dari para orang tua, "Dari MOU ini saya minta kepada Kepala Desa dan Lurah agar berkolaborasi dengan para orang tua, kepala sekolah PAUD/ TK dan RA yang ada di wilayahnya masing-masing sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi usia PAUD yang bersekolah sehingga tidak lagi anak usia PAUD yang tidak bersekolah," harap Bupati.

Mengenai wajib belajar 13 tahun, ini adalah komitmen kita bersama untuk memastikan bahwa setiap anak di Labuhanbatu menyelesaikan pendidikan dari jenjang minimal 1 tahun PAUD atau TK, SD hingga SMA atau SMK.

"Tidak boleh ada lagi anak yang putus sekolah karena alasan ekonomi atau akses, pemerintah akan terus berupaya menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, meningkatkan kualitas guru, serta memberikan berbagai program bantuan bagi siswa yang membutuhkan," ujar Bupati.

Menurut dr. Maya, pendidikan adalah pondasi utama kemajuan suatu bangsa. Ia adalah investasi terbaik untuk masa depan, baik masa depan individu maupun masa depan



Bupati Labuhanbatu, dr. Hj. Maya Hasmita, S.p. OG, M.K.M (pakai batik Korpri).

daerah kita, kita semua memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap anak di daerah ini mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas.

Saat ini kita dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan angka partisipasi siswa PAUD dan juga memastikan keberhasilan program wajib belajar 13 tahun: program ini merupakan pilar penting dalam upaya kita mencetak generasi labuhan batu yang cerdas, terampil, dan berdaya saing.

"Pendidikan Anak usia dini bukanlah sekadar tempat bermain, melainkan fase krusial dalam pembentukan karakter dan kemampuan dasar anak-anak," sebut Bupati.

Dalam maklumatnya Bupati mendorong seluruh kepala desa dan kelurahan untuk memastikan setiap anak usia 3 sampai 6 tahun mendapatkan akses layanan PAUD yang inklusif, aman dan bermutu, bupati juga menginstruksikan kepada seluruh kepala desa dan kelurahan agar mengintegrasikan program PAUD ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Desa termasuk melalui APBdes.

Selain itu bupati juga menegaskan untuk meningkatkan kolaborasi lintas sektor termasuk Dinas Pendidikan, dinas PMD TP, PKK, Himpaudi, IGTKI dan mitra pembangunan lainnya dalam mendukung layanan PAUD holistik, integratif serta menjamin keberlanjutan program PAUD melalui kebijakan regulasi dan dukungan anggaran yang berpihak pada anak usia dini dan pendidikan PAUD.

Di sisi lain mewakili kepala Desa dan Kelurahan se-kabupaten Labuhanbatu, Kepala Desa Pangkatan Rustam Effendi Ritonga dalam maklumatnya diantaranya berbunyi, siap mendukung program bunda PAUD Labuhanbatu dalam rangka penyelenggaraan PAUD yang inklusif dan bermutu di setiap desa serta meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS) dengan melakukan pendataan anak usia 3 sampai 6 tahun yang belum mengakses layanan PAUD serta mendorong orang tua untuk menyekolahkan anak usia dini kesatuan PAUD terdekat.

(M.Sukma)

## Bupati Asahan Hadiri Pelantikan Pengurus KONI Sumut Periode 2025-2029



Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar saat menghadiri pelantikan Pengurus KONI Provsu Periode 2025-2029. (TP)

ASAHAH, BN - Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos., M.Si menghadiri pelantikan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) Periode 2025-2029 dengan mengangkat tema "Kolaborasi Sumut Berkah dan Berprestasi" yang dilaksanakan di Regale International Convention Centre Jalan H Adam Malik No. 66-68 Silsilah Kecamatan Medan Barat Kota Medan pada Selasa (10/06/2025).

Dalam kegiatan Pelantikan Pengurus KONI Provinsi Sumatera Utara tersebut Gubus Bobby Afif Nasution, mengatakan ada tiga pesan penting yang harus menjadi perhatian pengurus KONI. Pertama, meningkatkan prestasi atlet dan cabang olahraga terutama menuju PON ke-22 di NTT-NTB, kemudian membantu menghilangkan permasalahan dan menjadi solusi untuk penyelesaian

masalah narkoba di Sumut. Selanjutnya, membuat ekosistem olahraga bisa menjadi industri olahraga.

Bobby juga meminta KONI Sumut memiliki cabor unggulan yang nantinya bisa melahirkan atlet nasional.

"Selain mengembangkan prestasi atlet, juga bisa melihat cabor unggulan di Sumut. Keleluasaan KONI di kabupaten dan kota untuk Bidang Sarana dan Prasarana. Bidang ini terfokus pada pemanfaatan sarana dan prasarana venue pasca digunakan untuk PON 2024 lalu.

"Bidang ini, kami bentuk agar sarana dan prasarana olahraga di Sumut, terutama eks PON bisa dimaksimalkan untuk prestasi olahraga di Sumut. Tentunya akan dirawat dengan sebaik mungkin," ungkapnya.

Ketua KONI Pusat, Mariano Norman berpesan agar kepengurusan KONI yang baru bisa bekerja sama dengan pemerintah Provinsi. Terutama dalam menyuksekan program pembinaan cabang olahraga dalam melahirkan atlet berprestasi. "Komunitas olahraga itu sangat berarti. Olahraga tidak akan pernah maju, KONI tidak akan pernah mampu melaksanakan tugasnya, tanpa dukungan dari gubernur.

Dalam hal ini terutama

kolaborasi dengan gubernur Sumut," ucap Mariano Norman.

Ketua KONI Provsu, Hatunggal Siregar pada sambutannya mengatakan, KONI Provsu tahun ini membentuk Wakil Ketua untuk Bidang Sarana dan Prasarana. Bidang ini terfokus pada pemanfaatan sarana dan prasarana venue pasca digunakan untuk PON 2024 lalu.

"Bidang ini, kami bentuk agar sarana dan prasarana olahraga di Sumut, terutama eks PON bisa dimaksimalkan untuk prestasi olahraga di Sumut. Tentunya akan dirawat dengan sebaik mungkin," ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Asahan menyatakan siap mendukung prestasi olahraga di Sumatra Utara untuk melahirkan atlet-atlet yang berprestasi dan olahraga unggulan. "Kita dari daerah siap berkolaborasi melahirkan atlet berprestasi," ucap Bupati Asahan.

(TP)

Labuhanbatu yang diikuti 13 Club SSB U-13 dan 13 Club SSB U-15 se-Kabupaten Labuhanbatu.

Dana juga mengucapkan selamat bertanding dalam turnamen sepak bola Soeratin U-13 dan U-15 jaga sportifitas saat bertanding. "Karena juara sejati adalah juara yang menjunjung tinggi sportifitas saat bertanding, kalah menang hal yang biasa dalam pertandingan," ucapnya.

"Karna tim sepak bola yang bermain ini adalah sama-sama masyarakat Labuhanbatu, mari kita ciptakan turnamen sepak bola ini menjadi ajang silaturahmi," cetus Dana.

Di tempat yang Sama

Ketua Panitia Kompetisi Soeratin U-13 dan U-15 memperebutkan Piala Bupati Labuhanbatu Askab PSSI Labuhanbatu tahun 2025 Fazarsyah Putra sering di sapa Abe saat ditemui di lapangan stadion bina raga mengatakan, di gelarnya Kompetisi Soeratin U-13 dan U-15 untuk mencari bibit muda pesepak bola usia dini.

"Karena banyak pemain sepak bola di Club SSB yang ada di Kabupaten Labuhanbatu, jadi kita buat kompetisi ini untuk menyalurkan bakat generasi muda usia dini dari U-13 dan U-15 yang selama ini berlatih di Club SSB nya. Jadi bakat nya

■ Bersambung ke hal.11 kol.5



Plt Kadispora Kabupaten Labuhanbatu M. Anugerah Perdana Rambe S. STP saat membuka Kompetisi Soeratin di lapangan stadiun binaraga (M.Sukma)

LABUHANBATU, BN - Bupati Labuhanbatu dr. Hj. Maya Hasmita Sp. OG. MKM di wakili Plt Kadispora M. Anugerah Perdana Rambe S. STP saat Membuka turnamen sepak bola Soeratin U-13 dan U-15 di Lapangan stadiun binaraga Kelurahan

Siringgo ringgo Kecamatan Rantau Utara, Senin (16/6/25).

Dana sapaan akrabnya

dalam sambutannya me-

nyampaikan kepada para

peserta turnamen, pertan-

dingan yang digelar mem-

perebutkan Piala Bupati

## HUT Bhayangkara Ke 79, Polres Labuhanbatu Salurkan Bantuan Sembako untuk Penggali Kubur



LABUHANBATU, BN - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79 tahun 2025, Polres Labuhanbatu menunjukkan kepedulian sosial dengan melaksanakan kegiatan pemberian bantuan sosial berupa paket sembako kepada para penggali kubur yang selama ini berperan dalam pelayanan pemakaman di wilayah Rantauprapat. Kegiatan ini dilaksanakan di Komplek Perkuburan Muslim Jalan MH. Thamrin, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Rabu (18/06/2025).

Pemberian bantuan tersebut dipimpin oleh Kassubag Kerma Polres Labuhanbatu AKBP AS. Pohan. Mereka menyeraikan langsung bantuan kepada tiga orang penggali kubur yang selama ini bekerja dengan penuh dedikasi di wilayah tersebut.

Adapun masyarakat penerima bantuan sosial adalah Muhammad Budi (42), Rohadi (48), dan Muhammad Syukur (53). Ketiganya merupakan warga Kecamatan Rantau Utara dan telah lama berprofesi sebagai penggali kubur di lingkungan masyarakat.

Kegiatan ini merupakan wujud nyata empati dan penghargaan Polres Labuhanbatu terhadap profesi yang kerap terlupakan, namun memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Bhayangkara ke-79 yang mengangkat semangat humanis dan berbagi.

Kapolres Labuhanbatu, AKBP Choky Sentosa Meliala, S.I.K., S.H., M.H., melalui Kasubsidi PID M Sie Humas, IPTU Arwin, S.H., menyampaikan "Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa Polri hadir tidak hanya dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, terutama kepada mereka yang selama ini bekerja di balik layar tanpa banyak sorotan," ujar Iptu Arwin.

Pemberian bantuan ini pun berlangsung dengan hangat dan penuh kekeluargaan. Para penerima menyampaikan ucapan terima kasih atas kepedulian dan perhatian yang diberikan oleh jajaran Polres Labuhanbatu.

Dengan semangat Bhayangkara yang terus bertransformasi menuju Polri yang Presisi, Polres Labuhanbatu berkomitmen untuk terus menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat serta hadir sebagai bagian dari solusi sosial di tengah kehidupan warga. (M.Sukma)

## Desa Limbongan Beltim Raih Juara 1 Lomba Desa Tingkat Provinsi Kepulauan Babel Tahun 2025



MANGGAR, BN - Desa Limbongan Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur (Beltim) berhasil meraih juara pertama penilaian desa dan kelurahan tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) tahun 2025.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPKB) Kabupaten Beltim melalui Sekretaris DPMDPKB Melita Indah Nurhayati mengatakan penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Kepulauan Babel kepada Kepala Desa Limbongan Dedi Sugianto pada acara rapat koordinasi pemerintahan desa dan penyerahan penghargaan juara lomba desa dan kelurahan serta lomba teknologi tingkat Provinsi Kepulauan Babel di Pangkalpinang, Selasa (17/6).

Dengan apresiasi tersebut, Desa Limbongan berhasil maju ke kompetisi tingkat regional mewakili Provinsi Kepulauan Babel bulan depan.

Melta menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas prestasi yang dicapai Desa Limbongan. "Alhamdulillah, Kabupaten Beltim berhasil menjadi yang terbaik di Provinsi Kepulauan Babel. Mudah-mudahan untuk persiapan Desa Limbongan pasca lomba desa tingkat provinsi menuju penilaian regional mendapat dukungan dari segenap unsur baik kabupaten maupun provinsi," ungkapnya kepada DiskominfoSP, Rabu (18/6).

Ia berharap prestasi ini dapat memotivasi desa-desa lain di Kabupaten Beltim untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kami ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga prestasi ini dapat diraih Desa Limbongan. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Beltim serta menjadi inspirasi bagi desa-desa lain untuk menunjukkan kemajuan di berbagai bidang di desanya," ujar Melta.

Perlu diketahui, dengan penilaian lomba desa/kelurahan tingkat Provinsi Kepulauan Babel di tahun 2025 ini, Desa Limbongan memiliki kinerja terbaik di bidang pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan. (DiskominfoBeltim/As)

## Sat Narkoba Polres Labuhanbatu Tangkap Residivis Kasus Sabu di Merbau



Tersangka SA alias Usro (33). (M.Sukma)

LABUHANBATU, BN - Satres Narkoba Polres Labuhanbatu kembali menunjukkan komitmenya dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Labuhanbatu. Seorang residivis kasus narkotika berinisial SA alias Usro (33) kembali diamankan setelah kedapatan membawa narkotika jenis sabu di wilayah Dusun II Desa Blungkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Penangkapan dilakukan pada Senin malam, 16 Juni 2025, sekitar pukul 22.00 WIB. Tim yang dipimpin langsung oleh Kanit Idik I Satres Narkoba, IPDA Rahmadhan Hilal, S.E., mengamankan tersangka di pinggir jalan saat tengah berada di lokasi yang terpantau sebagai titik rawan peredaran narkoba.

Kasat Narkoba, AKP Sopar Budiman, SH, menjelaskan "Dari hasil penggeledahan awal, tim menemukan dua bungkus plastik klip sedang berisi sabu dengan berat bruto 5,22 gram yang terjatuh di atas aspal tepat di tempat tersangka berdiri," ucap Sopar. Barang bukti lain yang diamankan di lokasi antara lain satu buah dompet kain warna pink, dua helai tisu, satu unit handphone Android merk Samsung warna hitam, serta satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam bermotor polisi B 4953 KKQ yang digunakan tersangka.

Kapolres Labuhanbatu, AKBP Choky Sentosa Meliala, S.I.K., S.H., M.H., melalui Kasubsidi PID M Sie Humas, IPTU Arwin, S.H., menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberi ruang bagi jaringan peredaran narkotika di wilayah hukumnya, terlebih pelaku merupakan residivis dalam kasus serupa. "Ini bukti bahwa perang terhadap narkoba terus kami lakukan secara konsisten. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus bersinergi dengan kepolisian dalam memutus mata rantai peredaran narkoba," ucap Arwin.

Tersangka berikut barang bukti telah diamankan di Mapolres Labuhanbatu untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia. (M.Sukma)

## Antisipasi Banjir, Bupati Sidoarjo Susuri Sungai Mbah Gepuk

SIDOARJO, BN - Banjir di wilayah sidoarjo selatan melumpuhkan jalan raya porong dan sekitarnya dua hari yang lalu. Bupati Sidoarjo H. Subandi bersama Kepala Dinas PU Binamarga serta beberapa pejabat di Sidoarjo menyusuri sungai Mbah Gepuk, Jum'at (20/06/2025). Kegiatan ini dilakukan dalam upaya normalisasi sungai untuk menekan resiko terjadinya banjir, utamanya kawasan Tanggulangin dan Candi yang kerap menjadi langganan banjir setiap kali musim penghujan.

Dengan menyusuri sungai, menurut Bupati Subandi, paling tidak bisa mengetahui apa yang menjadi penyebab aliran sungai tidak mengalir lancar. Jika ditemukan banyak endapan lumpur bisa diselesaikan dengan pengeringan sungai serta pembersihan tanaman liar yang menjadi penyebab sungai menjadi dangkal.



Bupati Sidoarjo H. Subandi. (ist)

"Banyak aliran sungai yang mengalami pendangkalan yang disebabkan tertutup tumbuhan seperti eceng gondok dan kangkung, ini yang menyebab aliran sungai tidak lancar untuk itu pada kesempatan ini saya memastikan pengeringan normalisasi akan terus dikeluarkan", katanya

Dengan melaksanakan sidak ini telah diketahui apa yang menjadi penyebab banjir, pendangkalan yang terjadi dilakukan pengeringan sepanjang 2,5 kilometer hingga bulan Juli mendatang ditargetkan 3,8 kilometer.

Subandi menegaskan, normalisasi difokuskan di wilayah yang selama ini menjadi langganan banjir, seperti Tanggulangin, Candi, hingga Porong. Ia juga

mengatakan akan dibangun DAM di wilayah Kedungpeluk karena hal ini juga sebagai bagian dari pengendalian banjir.

"Pemenang proyek sudah ada, tinggal pelaksanaan, Kami

■ Bersambung ke hal.10 kol.5

## Panitia Bersyukur, Kontingen Kejurda Ramai

BELTIM, BN - Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Wydia Kemala Sari mewakili Gubernur Kepulauan Babel, Hidayat Arsani membuka Kejuaraan Daerah Pelajar XII Babel di Kabupaten Belitung Timur tahun 2025. Pembukaan dilakukan di Stadion Rimba Plawan, Kecamatan Damar, Kamis (19/6/2025) Sore.

Pembukaan ditandai dengan pemukulan bedug secara bersama oleh Wydia Kemala, Wakil Kapolda Babel Brigjen Tony Harsono, Anggota DPD RI Perwakilan Babel Bahar Buasan, serta Wakil Bupati Belfim Khairil Anwar. Turut hadir pula, perwakilan Forkopimda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Kab Belfim.

Sebanyak 766 kontingen dari tujuh Kabupaten/Kota se-Provinsi Babel ikut berpartisipasi dalam kegiatan



Wabup Belfim saat menyapa kontingen dari Kabupaten lainnya. (ist)

selama empat hari, dari 18 hingga 22 Juni 2025 ini. Tingkat partisipasi kontingen dinilai cukup baik, di tengah kondisi keuangan pemerintah yang terbatas.

Kota Pangkalpinang paling banyak mengirimkan kontingen dengan 150 orang. Kontingen Tuan Rumah Kabupaten Belfim berada di tempat ke dua dengan 131 orang. Sedangkan tetangganya, Kabupaten Bangka Belitung di tempat ke tiga dengan kontingen sebanyak 118 orang. Selanjutnya Kon-

tingen Kabupaten Bangka berjumlah 103 orang. Diikuti oleh Kabupaten Bangka Selatan 101 orang.

Kabupaten yang paling

jauh, Bangka Barat tak mau

ketinggalan dengan konti-

nen sebanyak 86 orang. Se-

dangkan Kabupaten Bangka

Tengah paling sedikit mengi-

rimkan kontingen yakni

hanya 77 orang.

Di temui usai upacara

pembukaan, Wydia mengaku

bersyukur atas tingkat

partisipasi Kabupaten/Kota

di Provinsi Babel. Meski dae-

rah banyak yang terkendala anggaran namun tetap berupaya mengirimkan kontingenya.

"Kami sangat berterima kasih kepada kabupaten/kota yang tetap mengirimkan atletnya, walau kita ketahui bersama di tengah keterbatasan anggaran ini," ujar Wydia.

Ajang dua tahunan sekali ini, kata Wydia merupakan seleksi prestasi pelajar, dari tingkat SD hingga SMA. Di mana para pemenang tiap cabang olahraga akan mewakili Provinsi Babel di ajang Pekan Olahraga Nasional (POPNAS) September 2025 di Jakarta.

"Harapannya ajang Kejurda ini kita dapat menjaring atlet-atlet berprestasi yang rencana awalnya akan dilaksanakan di Aceh dan Sumut. Namun karena adanya pemangkas anggaran dilaksanakan di Jakarta, semua kita menyesuaikan," kata Wydia. (Diskominfobelfim/As)

## Bupati Asahan Lantik 3 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

ASAHAH, BN - Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si melantik 3 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan, Rabu (11/06/2025) di aula Melati Pemkab Asahan.

Adapun pejabat yang dilantik pada hari ini yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan, Mohammad Azmy Ismail, A.P., M.Si yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Pol PP, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan Syahputra, S.E., M.M yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Air Batu dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asahan, Suherman Siregar, S.SIP., M.M yang sebelumnya



Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, saat melantik 3 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemkab Asahan. (tp)

juga menjabat sebagai Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Asahan.

Bupati menyampaikan jabatan bukanlah hadiah atau penghargaan semata semata, tetapi tanggung jawab yang harus di emban dengan penuh disiplin, dedikasi, loyalitas dan tentunya dapat dipertanggung jawabkan tidak hanya kepada pimpinan dan masyarakat tetapi juga dihadapan Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa di akhir kelak.

"Mari jadikan nilai-nilai Aparatur Sipil Negara yang selalu berorientasi pada lepayanan Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif dalam setiap gerak langkah sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat untuk menghadapi tantangan Pemerintah kedepan yang semakin kompleks," ungkap Bupati. (tp)

Aparatur Sipil Negara yang selalu berorientasi pada lepayanan Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif dalam setiap gerak langkah sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat untuk menghadapi tantangan Pemerintah kedepan yang semakin kompleks," ungkap Bupati. (tp)

## Bupati Asahan Berharap DHC 45 Dapat Menjaga Kelestarian Budaya Perjuangan

ASAHAH, BN - Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos., M.Si berharap kepada pengurus Dewan Harian Cabang (DHC) Badan Pembudayaan Kejuangan 45 untuk dapat menjaga dan merawat kelestarian budaya perjuangan di Kabupaten Asahan.

"Sejarah itu tidak boleh dikaburkan dan tempat sejarah harus dirawat, tujuannya agar generasi muda mengetahui dan memahaminya. Kita lahir saja ada sejarahnya," ucap Bupati saat menerima kunjungan pengurus DHC 45, Kamis (12/06/2025) di ruang kerjanya.

Kecamatan. Dan saat ini terbentuk pengurus Kecamatan sebanyak 17 Kecamatan. Kekurangannya akan terus dilakukan konsolidasi," ucap Ketua.

Kemudian Ketua juga sedikit menceritakan sejarah Kesultanan Asahan dengan Kerajaan Aceh serta putri Margolang. Dari cerita tersebut terlihatlah tempat-tempat bersejarah di Kabupaten Asahan. "Sejarah Asahan ini harus diketahui kita semua, sejarah ini saya dengar langsung dari orang tua saya. Dan saya siap menjadi nara sumber dalam sejarah Asahan". Sambung Ketua sembari mengucapkan terimakasih kepada Bupati Asahan yang telah menerima pihaknya serta dukungannya terhadap DHC 45 Asahan. (tp)

Sementara itu, Ketua DHC 45 Asahan, Ridwan sedikit menjelaskan kondisi kepengurusan serta keberadaan kantor yang berada di gedung juang 45 Jalan Hos Cokroaminoto Kisaran perlu mendapatkan perhatian. "Selain pengurus di Kabupaten, ada juga pengurus di

## 82,8% Warga Jember Puas Kinerja Gus Fawait



Bupati Jember Gus Fawait.

JEMBER, BN - Lembaga survei The Republic Institute merilis hasil kepuasan warga Jember terhadap kinerja Bupati Muhammad Fawait (Gus Fawait) selama 100 hari awal menjabat. Hasilnya 82,8% warga Jember puas. Peneliti Utama The Republic Institute Dr Sufyanto membeberkan sejumlah sektor yang paling dirasakan programnya oleh warga Jember selama Gus Fawait menjabat.

"Mayoritas masyarakat menyatakan sangat puas terhadap kinerja pemerintah daerah, dengan skor tertinggi pada bidang pelayanan publik sebesar 87,2 persen," kata Sufyanto dalam keterangannya, Senin (16/6/2025).

Sufyanto mengungkap kepuasan di sektor pemerintah daerah ini disebabkan keberhasilan Pemkab Jember dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik. "Program Wadul Gus'e dan UHC Prioritas merupakan program yang mendapatkan banyak apresiasi dari masyarakat. Penilaian ini secara umum mencakup aspek aksesibilitas, yaitu kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan seperti kesehatan, pendidikan, dan perizinan, kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan, serta efisiensi dan proses, yakni kecepatan dan ketepatan layanan yang diberikan," bebernya.

Selanjutnya, Sufyanto menyebut bidang pembangunan dan infrastruktur juga mendapat respons positif dengan tingkat kepuasan 83,2%. Masyarakat mengapresiasi program seperti URC (Unit Reaksi Cepat) dan pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan.

"Selain itu, bidang Sosial dan Ekonomi, Bidang Pemerintahan Umum, Bidang Transportasi dan Mobilitas turut menunjukkan tingkat kepuasan yang cukup tinggi. Secara keseluruhan, data survei ini menggambarkan bahwa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Jember telah berhasil menciptakan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat dalam waktu singkat," jelasnya.

Sufyanto juga membeberkan program yang memperoleh tingkat kepuasan tertinggi adalah Platform Aduan Warga (Wadul Gus'e) dengan nilai 83,5. Disusul Program Universal Health Coverage (UHC Prioritas) sebesar 82, dan Perbaikan Infrastruktur melalui Unit Reaksi Cepat (URC) sebesar 80,9.

"Program lain yang juga mendapat apresiasi tinggi mencakup pembangunan infrastruktur desa 79,1, Program Mljo Cinta untuk penjaga sayur 78,9, dan 20.000 beasiswa bagi pelajar/mahasiswa ber-KTP Jember mendapat skor kepuasan 78,4," jelasnya. "Selain itu, Koperasi Merah Putih untuk pemberdayaan desa 78,3, program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa) 75, Sekolah Rakyat bagi masyarakat kurang mampu 73,7, dan BPJS Kesehatan untuk pekerja informal 72,8 juga menunjukkan tingkat kepuasan yang signifikan. Data ini mencerminkan bahwa masyarakat Jember menilai positif berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar, pembangunan desa, pendidikan, dan kesehatan," tambahnya.

Sufyanto menambahkan berdasarkan data survei pada bidang Pembangunan Desa dan Pemberantasan Kemiskinan, Bupati Jember menempati peringkat pertama dengan tingkat kepuasan publik sebesar 83,1%. "Capaian ini menunjukkan keberhasilan Pemkab Jember dalam menjalankan program-program yang menyasar masyarakat desa dan kelompok rentan secara efektif, seperti bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi desa, serta peningkatan infrastruktur pedesaan," tandasnya.

Survei The Republic Institute dilakukan di seluruh kecamatan di Jember pada 15-22 Mei 2025 dengan melibatkan 800 responden. Survei menggunakan metode Stratified Random Sampling dengan margin of error sebesar 3,46%. (dtc/red)

## Bupati Asahan Serahkan Sapi Qurban Presiden Prabowo ke Masjid Raya Kisaran



Bupati Asahan, H. Taufik Zainal Abidin Siregar, saat menyerahkan hewan qurban dari Presiden Prabowo ke Panitia Qurban Masjid Raya Kisaran Sabtu 7 Juni 2025. (tp)

ASAHAH, BN - Bupati Asahan, H. Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos., M.Si didampingi Wakil Bupati Asahan, H. Rianto, S.H., M.AP secara resmi menyerahkan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto, kepada Panitia Qurban Masjid Raya Kisaran pada Sabtu, 7 Juni 2025.

Dalam sambutannya, Bupati Asahan menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian Presiden kepada masyarakat Kabupaten Asahan. "Atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan dan seluruh masyarakat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden atas bantuan hewan kurban ini. Semoga menjadi berkah dan mendorong tumbuhnya kepedulian sosial di tengah masyarakat," ucap Bupati.

Presiden Prabowo Subianto diketahui menyalurkan sebanyak 578 ekor sapi kurban ke berbagai wilayah di Indonesia dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1446 H/2025 M. Salah satu daerah penerima adalah Kabupaten Asahan, yang mendapatkan penyaluran langsung untuk Masjid Raya Kisaran.

Setelah prosesi penyerahan, hewan kurban langsung disembelih di halaman Masjid Raya Kisaran, dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ketua Panitia Qurban Masjid Raya Kisaran, Abdul Muhaimin Nasution, mengungkapkan rasa syukur atas bantuan hewan kurban dari Presiden RI. (tp)

## Bupati Apresiasi Polres Bogor Beri Nama Pos Gadog dan Jalan Ciawi Gadog Diberi Nama Hoegeng



Bupati Bogor Rudy Susmanto. (Em)

BOGOR, BN - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengapresiasi langkah Kapolres Bogor yang memberikan nama Pos Gadog Hoegeng dan Pos Soebianto. Menurutnya nama-nama besar tersebut sangat inspiratif dan memberikan contoh keteladanan.

Demikian diungkapkannya pada Peresmian Pos Gadog Hoegeng di Ciawi, Pos Soebianto di Sentul. Selain dua pos tersebut, diresmikan juga nama ruas jalan Ciawi - Gadog sebagai Jalan Hoegeng.

Peresmian dilakukan Bupati Bogor, Rudy Susmanto bersama Kapolda Jawa Barat, Irjen Rudi Setiawan. Turut serta dalam peresmian tersebut, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, Kapolresta Bogor Kota Kombes Eko Prasetyo, anggota DPR RI Komisi V, Marlyn Maisarah, anggota DPR RI Komisi VII, Ilham Permana, Dandim 0621/Kab. Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Keluarga Jenderal Hoegeng, dan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Bupati Rudy menyampaikan bahwa langkah ini bukan sekadar perubahan nama, tetapi merupakan wujud penghargaan atas jasa dan keteladanan para tokoh nasional. Hari ini anak muda tidak diminta meneteskan keringat, darah dan air mata untuk memperjuangkan kemerdekaan.

Selanjutnya, Kapolres Jawa Barat, Irjen Rudi Setiawan turut mengapresiasi Kapolres Bogor atas inisiasinya mau mengubah wajah fisik dari Pospol Gadog ini. Tidak hanya mengubah fisiknya, tetapi pasti bertujuan memberi pelayanan lebih baik dari sebelumnya. "Terima kasih kepada Bupati Bogor, Rudy Susmanto dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan. Keberadaan pos-pos ini penting dalam mengatur lalu lintas dan membantu melayani masyarakat," ujar Irjen Rudi.

Menurut Irjen Rudi, sosok-sosok tersebut penuh integritas, sangat sederhana dan melayani masyarakat. Diharapkan dengan pemberian nama Pospol dan jalan ini dapat menginspirasi kita yang menghuni dan melewati jalan ini khususnya polisi nanti. (em)

# Selesaikan Polemik PWI, Zulmansyah Usulkan Kongres Persatuan Dipercepat



Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Zulmansyah Sekedang. (Foto: ist)

**BANDUNG, BN** – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Zulmansyah Sekedang, mengusulkan percepatan pelaksanaan Kongres Persatuan PWI guna menyelesaikan polemik internal dan mencegah berlarutnya dualisme kepemimpinan di tubuh organisasi.

Menurut Zulmansyah, usulan tersebut muncul setelah munculnya kembali pernyataan dari Hendry Ch Bangun yang tetap mengklaim dirinya sebagai ketua umum PWI, kendati telah diberhentikan sebagai anggota. "Banyak wartawan di daerah tidak mengetahui bahwa Hendry sudah diberhentikan sebagai anggota PWI. Maka, secara otomatis, dia juga tidak lagi menjabat

Tak hanya itu, Hendry juga disebut menolak keputusan Dewan Kehormatan, melakukan pemecatan terhadap pengurus DK, serta membentuk lembaga tandingan secara sepihak. "Tindakan-tindakan tersebut dinilai melanggar konstitusi organisasi," ujar Zulmansyah, didampingi Sekretaris Jen-

gan lima terdakwa korporasi tersebut mengembalikan uang kerugian negara yang ditimbulkannya, yaitu Rp 11.880.351.802.619," ujar Direktur Penuntutan Kejaksaan Agung, Sutikno, dalam konferensi pers di Gedung Bundar Jampidsus, Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (17/6).

Sutikno mengatakan, uang yang dikembalikan oleh Wilmar Group ini langsung disita oleh penyidik dan dimasukkan ke rekening penampungan Jampidsus. Uang yang dikembalikan ini merupakan hasil kerugian negara yang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dalam perkara ini ada tiga korporasi yang terlibat dalam korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO Januari 2021 sampai dengan Maret 2022, yaitu PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group. Ketiganya didakwa dengan dakwaan primar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada proses penuntutan, PT Wilmar Group dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar dan uang pengganti sebesar Rp 11.880.351.802.619. Jika uang ini tidak dibayarkan, harta Tenang Parulian selaku Direktur dapat disita dan dilelang, apabila tidak mencukupi terhadap Tenang Parulian dikenakan subsidiar pidana penjara 19 tahun.

Sementara Permata Hijau Group dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar dan uang pengganti sebesar Rp 937.558.181.691,26. Jika uang ini tidak dibayarkan, harta David Virgo selaku pengendali lima korporasi di dalam Permata Hijau Group dapat disita untuk dilelang, apabila tidak mencukupi terhadap David Virgo dikenakan subsidiar penjara selama 12 bulan.

Terdakwa Musim Mas Group dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar dan uang pengganti sebesar Rp 4.890.938.943.794,1. Jika uang ini tidak dibayarkan, harta milik para pengendali Musim Mas Group, yaitu Ir. Gunawan Siregar selaku Direktur Utama dan sejumlah pihak lainnya akan disita untuk dilelang, apabila tidak mencukupi maka terhadap personel pengendali dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 15 tahun.

Dalam putusannya, majelis hakim menyebutkan kalau para terdakwa terbukti melakukan perbuatan sesuai yang

ketua umum," kata Zulmansyah dalam siaran pers, Minggu, 15 Juni 2025.

Pemecatan terhadap Hendry, lanjut dia, dilakukan melalui tiga jalur organisasi resmi, yakni Dewan Kehormatan PWI Pusat, PWI Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah keanggotaannya, dan forum Kongres Luar Biasa (KLB) Bahkan, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 18 Maret 2025

memperkuat keputusan DK PWI Pusat, bahwa pemecatan Hendry sebagai anggota PWI sudah final.

Dasar pemberhentian tersebut, menurut Zulmansyah, terkait dugaan pelanggaran etik yang melibatkan penerimaan dan pemberian insentif atau "cashback" dari dana bantuan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang bersumber dari Forum Human BUMN.

Tak hanya itu, Hendry juga disebut menolak keputusan Dewan Kehormatan, melakukan pemecatan terhadap pengurus DK, serta membentuk lembaga tandingan secara sepihak. "Tindakan-tindakan tersebut dinilai melanggar konstitusi organisasi," ujar Zulmansyah, didampingi Sekretaris Jen-

deral PWI Pusat Wina Armada Sukardi.

Zulmansyah menyayangkan pernyataan Hendry yang muncul hanya sehari setelah penandatanganan kesepakatan bersama di Dewan Pers untuk menyelenggarakan Kongres Persatuan PWI. Pernyataan tersebut, menurutnya, bertolak belakang dengan semangat rekonsiliasi yang telah disepakati kedua belah pihak.

"Kalau begini, lebih baik Kongres dipercepat. Kalau bisa bulan Juli, tidak perlu menunggu Agustus," katanya.

Proses Rekonsiliasi; Sebalumnya, dua kubu yang berselisih di tubuh PWI telah mendatangkan Kesepakatan Jakarta di kantor Dewan Pers.

Dalam kesepakatan itu, kedua pihak sepakat untuk menyelenggarakan Kongres Persatuan PWI paling lambat pada 30 Agustus 2025. Panitia pelaksana dari Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) telah mulai bekerja menyiapkan kongres.

Zulmansyah menegaskan, langkah ini merupakan upaya untuk mengembalikan kesatuan organisasi serta menjaga marwah profesi wartawan. "PWI adalah milik bersama. Jangan sampai dijadikan alat oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi," ujarnya.

Status Administratif; Terkait status hukum, Zulman-

syah menjelaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah membuka kepengurusan PWI versi Hendry Ch Bangun. Selain itu, Dewan Pers juga tidak lagi mengakui Hendry sebagai ketua umum dan telah milarang penggunaan fasilitas organisasi oleh pihaknya. Ia juga menekankan pentingnya pemahaman mengenai perbedaan antara legalitas administratif dan keabsahan organisasi berdasarkan etik dan konstitusi.

"Putusan selama dari pengadilan bukanlah putusan akhir. Wartawan perlu memahami konteks hukum organisasi secara utuh," kata dia.

Sebagai penutup, Zulmansyah mengimbau seluruh anggota PWI dan insasi pers untuk tetap memegang prinsip kehati-hatian dalam menyikapi berbagai klaim yang beredar. Ia mengajak seluruh wartawan mendukung upaya rekonsiliasi, bukan memperkeruh suasana dengan narasi yang belum tentu benar. "Jangan mudah percaya dengan satu narasi saja. Periksa fakta dan hargai proses yang sedang berjalan. Mari kita juga marwah PWI bersama-sama," kata Zulmansyah.

(Zaen)

## Sambungan hal 1

didakwakan oleh JPU. Namun, perbuatan para terdakwa ini dinyatakan bukan suatu tindak pidana atau *ontslag*.

Di sini, Kejaksaan Agung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Terhadap jumlah uang yang dikembalikan tersebut, Penuntut Umum telah melakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst tanggal 04 Juni 2025, penyitaan tersebut dilakukan pada tingkat penuntutan dengan mendasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 38 ayat (1) KUHAP untuk kepentingan pemeriksaan kasasi.

"Setelah dilakukan penyitaan, Tim Penuntut Umum mengajukan tambahan memori kasasi yaitu memasukkan uang yang telah disita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi, guna menjadi bahan pertimbangan oleh Hakim Agung yang memeriksa Kasasi, khususnya terkait sejumlah uang tersebut 'dikompensasi' untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi dari para Terdakwa Korporasi tersebut," ujar Sutikno.

## Apresiasi

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung menyita Rp11,8 triliun dari korporasi Wilmar Group dalam perkara korupsi persetujuan ekspor CPO periode 2021 – 2022.

"Langkah progresif Kejaksaan Agung ini patut diapresiasi. Ini adalah bentuk nyata komitmen penegakan hukum dan perlindungan terhadap kepentingan negara," kata Menko Budi dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (18/6).

Budi menjelaskan bahwa pihaknya mendukung penuh penanganan kasus korupsi CPO Wilmar Group yang saat ini sedang diusut Kejaksaan Agung. Ia juga mendukung langkah-langkah pihak di bawah naungan Desk Penindakan Korupsi bentukan Menko Polkam yang terlibat dalam penanganan kasus korupsi tersebut.

Budi berharap penanganan kasus korupsi ini bisa berjalan dengan adil dan transparan demi terciptanya keyakinan publik akan kinerja penegak hukum Indonesia. "Penanganan kasus ini akan menjadi contoh penting dalam penegakan hukum yang adil dan transparan. Pemerintah akan terus mengawal proses hukum ini hingga tuntas," kata Budi.

(hukumonline.com/red)

## Sambungan hal 1

ada pemberdayaan warga dilibatkan untuk bekerja dalam proyek tersebut, apakah betul-betul dilaksanakan?

Sementara Advokat yang berdomisili di Lumajang, Heru Laksono, mantan anggota DPRD Kab. Lumajang, menyoroti kasus ini kuat dugaan ada permainan proyek/bancakan proyek BKK Provinsi Jawa Timur dengan nilai sangat fantastis Rp. 1.475 Miliar tersebut.

"Apalagi proyek tersebut BKK Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, dan dikerjakan tahun 2025 sampai sekarang belum selesai, seharusnya bila pencairan

dana sudah terlalu meletak akhir tahun 2024 dan bila dikerjakan saat itu tidak sampai dengan batas waktunya, sebenarnya biar dana tersebut masuk dana Silpa dan Tahun berikutnya masih bisa diharap untuk dimohon kembali," ujarnya.

Dikatakan Heru temuan ini harus segera ditindak lanjuti jika ada dugaan indikasi penyimpangan, maka pihak berwenang/APH harus mengambil langkah hukum, masyarakat berhak tahu bagaimana anggaran BKK Provinsi Jawa Timur mereka kelola. Untuk proyek tersebut harus diawasi terus menerus

# Oknum Guru SMPN 1 Pusakanegara Diduga Lakukan Kekerasan ke Siswa



**SUBANG, BN** – Dugaan kekerasan terhadap siswa kembali mencoreng dunia pendidikan. Seorang siswa SMP Negeri 1

Pusakanegara berinisial S (16), warga Desa Pusakanegara, Kabupaten Subang, Jawa barat, diduga mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum guru di sekolahnya.

Peristiwa terjadi pada hari Jumat, bulan Mei 2025. Hingga hari ini, Selasa (11/6), korban masih menjalani perawatan medis akibat nyeri berkelanjutan di area kepala yang diduga sebagai dampak dari pemukulan tersebut.

Menurut keterangan ibunda korban, Resini, anaknya bersama dua siswa lain dipanggil masuk ke ruang guru oleh dua oknum guru berstatus honorer, yakni Ibu Asma dan Ibu Ayu. Di dalam ruangan sudah hadir pula seorang guru PNS/ASN bernama Drs. Tri Djatmiko. Setelah pintu ruangan dikunci, ketiga siswa diduga langsung mendapatkan kekerasan fisik, mulai dari tamparan, pukulan hingga cekikan terhadap Supriatna.

"Anak saya ditampar dan dicekik di depan dua guru lainnya yang tidak menghentikan tindakan tersebut. Bahkan Ibu Asma terus mengomel dan menyudutkan mereka," ujar Resini kepada bidiknasional.com.

Dalam proses konfirmasi dan klarifikasi, pihak keluarga justru mendapatkan pernyataan yang mengejutkan dari salah satu guru yang mengatakan bahwa "siswa yang susah diingatkan harus diberi efek jera dengan kekerasan".

Menanggapi kasus ini, Agus selaku Wakil Kesiswaan SMP Negeri 1 Pusakanegara menyampaikan bahwa pihak sekolah baru mengetahui kejadian tersebut dari laporan orang tua siswa. "Kami belum menerima laporan resmi sebelumnya. Informasi ini baru kami terima dari aduan pihak keluarga," kata Agus.

Di sisi lain, berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak sekolah, diketahui bahwa dugaan kekerasan ini dipicu oleh permasalahan sebelumnya, yakni dugaan pemalakan yang dilakukan oleh Supriatna di lingkungan sekolah. Namun, menurut keterangan sementara, tindakan tersebut dilakukan atas suruhan dari dua temannya yang juga terlibat dalam insiden pemanggilan ke ruang guru.

Pihak keluarga tidak menampik adanya kesalahan yang mungkin dilakukan oleh anak mereka, namun menegaskan bahwa tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan. "Kalau memang anak kami bersalah, harusnya diproses secara pembinaan dan prosedur, bukan dipukul seperti itu," tambah Resini.

Atas kejadian ini, keluarga korban menuntut pertanggungjawaban dari pihak sekolah dan meminta agar insiden ini diproses secara hukum agar menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Mereka juga meminta agar Dinas Pendidikan menindak lanjuti peristiwa ini secara objektif dan profesional. Media BN akan terus memantau dan mengawal perkembangan kasus ini hingga tuntas.

(M.Tohir/tim)

## Antisipasi Banjir ...

akan terus kontrol biar sungainya bersih dan paling tidak ditahun depan tidak ada dampak banjir, jika anggaran kurang akan kami siapkan lewat PAK (Perubahan Anggaran Keuangan), ujarnya.

lapun menambahkan jika Pemprov Jawa Timur juga telah mengurangkan dana sebesar Rp 37 miliar, dengan harapan dengan dana yang besar ini bisa menangani masalah banjir yang selama ini melanda wilayah Sidoarjo sehingga tidak terulang di tahun-tahun mendatang.

Sementara itu Kepala DPUBMSDA Sidoarjo Dwi Eko Saptono mengatakan, sidik batu dilakukan di aliran sungai Sidocepu mulai dari Ngaban hingga Kedungpeluk dengan total panjang sungai mencapai enam kilometer.

"Untuk tahap awal fokus pada normalisasi sepanjang dua kilometer dari Ngaban hingga Balonggabu yang akan dikerjakan dalam dua minggu ke depan, kemudian pada Juli akan dilanjutkan pekerjaan kontraktual sepanjang 3,8 kilometer dari Balonggabu ke jembatan Kedungpeluk dan Selain melakukan pengeringan, juga dilakukan pengerukan, juga dilakukan pengeringan yang meliputi pembersihan tumbuhan liar yang menyumbat aliran air," katanya.

Ia juga menambahkan jima banjir yang

## Sambungan hal 9

sempat menggenangi Jalan Raya Porong lebih disebabkan oleh kontur tanah yang landai dan intensitas hujan ekstrem. seperti tercatat bahwa Curah hujan yang terjadi mencapai 114 mm yang terjadi dalam tiga jam dan itu sudah termasuk kategori ekstrem ditambah lagi lokasinya yang memang tanahnya mengalami penurunan, namun untuk ini sudah disiapkan dua pompa oleh pemerintah pusat, masing-masing di Ketapang dan Siring.

"Sungai-sungai besar di Sidoarjo merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun pihaknya tetap melakukan pendampingan teknis, seperti pembersihan dan pengangkatan tanaman liar, seperti di wilayah Sidocepu ini alirannya langsung ke laut, jadi kewenangannya ada di balai pusat. Tapi kami tetap bantu secara operasional karena dampaknya banjir di wilayah kami," ucapnya

Dwi Eko juga menegaskan jika kapasitas sungai di Sidoarjo saat ini masih mampu menampung curah hujan hingga 70 mm. Namun jika lebih dari itu, air akan meluber ke permukiman dan jalan raya. Untuk itu dilakukan pengendalian dari pesisir Mengare. "Kita pastikan kapasitas sungai di kawasan padat seperti Tanggulangin dan Candi bisa optimal saat musim hujan, pungkasnya. (yah)

## PN Sidoarjo ...

pemilik sah lahan setelah gugatan mereka dimenangkan hingga tingkat kasasi.

"Alhamdulillah, meski penuh tantangan, eksekusi akhirnya terlaksana," ujar Abdul Salam, kuasa hukum PT Kejayaan Mas. Ia menyebut pembacaan eksekusi terpaksanya dilakukan dari sisi samping karena area utama dikuasai warga.

Menurutnya, ini adalah upaya ketiga sejak Februari 2025. Dua eksekusi sebelumnya gagal karena penghadangan oleh warga. Namun, pihak termohon menilai pelaksanaan eksekusi cacat secara hukum. Kuasa hukum mereka, Andi Fajar Julian, menyebut pemberitahuan eksekusi tidak sesuai prosedur.

"Surat fisik baru kami terima hari ini pukul 10 pagi. Informasi dari kepala desa, surat itu baru disampaikan kemarin, tanggal 17 Juni, pukul 2 siang. Iri jelas melanggar ketentuan administratif," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Panitera PN Sidoarjo, Rudi Hartono turut membenarkan bahwasannya telah membacakan penetapan Eksekusi disisi lain dari obyek sengketa. Dikarenakan, keadaan ribuan massa yang telah mengejutkan pihak Juru Sita (JS) PN Sidoarjo dan Pihak Polresta Sidoarjo. Akhirnya, JS memasuki wilayah obyek sengketa lewat pintu lainnya. "Massa kepung saya dan Pak Kapolresta Sidoarjo, tapi Juru Sita dibatalkan oleh massa. Akhirnya, memasuki obyek sengketa dan membacakan penetapan eksekusi dilain sisi," pungkas Rudi Hartono.

## Cuti ke Tingkok ...

Parawansa, di Universitas Peking, Tiongkok. Informasi tersebut dikonfirmasi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono Jumat (20/6/2025), kepada awak media.

Adhy menyampaikan bahwa Gubernur Khofifah telah mengajukan cuti sejak Jumat hingga Minggu (20-22 Juni 2025). Pemanggilan Gubernur Jatim oleh KPK Terkait Dana Hibah Pokmas sehingga akan dijadwal ulang.

"Gubernur sedang cuti karena menghadiri wisuda putranya di Peking University, Tiongkok. Cuti tersebut sudah diajukan secara resmi dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri," ujar Adhy.

## Data Penerima ...

Lalu, mengapa pengajuan pupuk berbasis data fiktif tersebut bisa lolos di Dinas Pertanian. "Apakah ini hanya kelalaian atau bagian dari skema kecurangan yang lebih luas? Saya curiga dan menduga ada keterlibatan oknum dalam birokrasi yang bermain," kata DK.

Manipulasi ini berdampak langsung pada akses petani asli terhadap pupuk subsidi, karena jatah pupuk yang seharusnya diberikan kepada kelompok tani yang benar-benar membutuhkan, justru dialihkan ke kelompok fiktif demi keuntungan pribadi.

Yang lebih memprihatinkan, laporan resmi terhadap dugaan ini sudah dilaporkan ke kepolisian Polda Jateng, tetapi hingga hari ini, belum ada tindakan nyata dan masih menunggu hasilnya.

Sementara itu, di tempat terpisah KPL (Kios Pupuk Lengkap) UD (Usaha Dagang) Ragil Saputro berinisial PTR, di Dusun Kedung, Desa Genengadal mengaku bahwa pihaknya sudah menjalankan sesuai prosedur yang benar. Bahwasannya pupuk bersubsidi hanya boleh dijual kepada petani yang terdaftar di RDKK serta dijual sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi).

Menurut PTR, pupuk bersubsidi hanya boleh dijual kepada petani yang terdaftar di RDKK. Setiap tahun pemerintah menentukan alokasi pupuk subsidi setiap daerah berdasarkan RDKK yang disusun kelompok tani dan penyuluh pertanian (PPL) serta disahkan pemerintah.

Menanggapi tentang adanya dugaan manipulasi daftar e-RDKK fiktif, ia menegaskan jika data yang masuk di kiosnya sekitar 250 orang petani yang terdaftar dalam RDKK. "Maka apabila ada dugaan manipulasi data fiktif selain petani saya tidak tau, karena saat penyusunan data RDKK kelompok tani didampingi PPL," terang PTR.

Ia juga menyebutkan, petani yang berhak mendapatkan alokasi subsidi pupuk adalah petani yang tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian), menggarap lahan maksimal dua hektar, dan menggunakan Kartu Tani.

Ia juga mengungkapkan, bahwa untuk pendistribusian pupuk bersubsidi di kiosnya berasal dari dua distributor yang berbeda. Adapun dua distributor tersebut masing-masing menyalurkan dua pupuk bersubsidi dengan jenis yang berbeda. Petrokimia ia dapatkan dari CV Murni Sriyaya sedangkan Urea berasal dari KUD Karya Jaya beralamat di Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya, jawaban berbeda disampaikan oleh CFS, Sebagai petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang membawai pembinaan para petani di Desa Genengadal, ia sudah bekerja sesuai tupoksinya.

Soal adanya dugaan manipulasi data fiktif dokumen RDKK dibantah CFS, menurutnya, data RDKK hanya satu dan tidak ada rekayasa. Dalam prosesnya poktan didampingi petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL) dalam

## Proyek Talud ...

Subkhan, Kepala Desa Rowoyoso, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, mengakui bahwa papan proyek belum dipasang. Ia menyebut bahwa pekerjaan talud tersebut menggunakan sistem swakelola yang dikerjakan oleh warga sekitar, dan papan informasi akan segera dipasang.

"Memang papan proyek pekerjaan talud belum dipasang, besok akan kami pasang. Sistem pekerjaannya swakelola, semua dikerjakan oleh warga sekitar," ujar Kades Rowoyoso, Senin (9/6/2025).

## Perdagangan Ginjal ...

Yusron menambahkan, kasus ini tidak masuk dalam ranah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena UU TPPO bersifat lex specialis, atau aturan khusus yang mengesampingkan aturan umum. "UU TPPO adalah lex specialis, jadi tidak menggunakan pendekatan KUHP, tapi langsung pada ketentuan khusus dalam undang-undang tersebut," ungkapnya.

Ia menyimpulkan bahwa dalam perkara perdagangan

## Kapolres Pelabuhan ...

penghargaan atas dedikasi dan kerja luar biasa dalam pengungkapan berbagai kasus menonjol di wilayah hukum setempat.

Selain itu, empat anggota lainnya juga menerima penghargaan atas prestasi dan dedikasi tinggi yang mereka tunjukkan dalam berdinamis di lingkungan Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Mereka adalah Ipda Wiji Mulyono, S.H,

## Tingkatkan Kapasitas ...

keuangan kelompok yang disebut Administrasi keuangan, merupakan dua hal yang sangat penting dan harus diperhatikan dalam kelompok tani ternak," imbuhnya.

Arifin, ketua kelompok tani ternak "Tani Mulyo" Desa Glongong Kecamatan

Dolopo Kabupaten Madiun, pada kesempatan itu ketika diwawancara mengatakan, "kelompok Tani Mulya menerima bantuan sapi dari APBN tahun 2021 sebanyak 20 ekor, dan berkembang biak menjadi 26, tapi ketika ada wabah virus PMK, sapi

dari kelompok kami banyak yang mati, sekarang tinggal 18 ekor. Sapi yang mati sudah kami laporkan berikut dengan data dan bukti yang ada kepada pemangku kepentingan."

"Kami dari kelompok Tani Mulyo sangat berharap kepada Dinas terkait adanya

## Sambungan hal 1

Sesuai ketentuan administratif, selama Gubernur Khofifah menjalani cuti, posisi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur dijalankan oleh Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak. Emil akan mengambil alih sejumlah tugas protokoler dan pengambilan kebijakan penting selama Khofifah tidak berada di dalam negeri. "Plt Gubernur dijalankan oleh Pak Emil, sesuai prosedur," denikian Adhy.

Sebelumnya KPK memberikan keterangan pers di Jakarta yakni penyidik selain manggil Khofifah juga memanggil, Sekretaris DPW PKB Jatim, Anik Maslachah.

(dji)

## Sambungan hal 1

menyusun kebutuhan pupuk tiga kali masa tanam selama setahun. Kelompok tani menulis luasan lahan miliknya itu berapa, namanya siapa, musim tanam pertama itu harus menanam apa, pupuk yang dibutuhkan tiga masa tanam itu berapa. Setelah itu disepakati, baru disusun dokumennya sama ppl di wilayah binaannya.

Setelah itu dokumen diserahkan ke masing-masing poktan untuk diteliti. Jika dinilai benar, dokumen tersebut akan ditandatangani ketua poktan, ketua gabungan kelompok tani (gapoktan) hingga kepala desa. Nantinya dokumen itu disusun dan akan dikumpulkan se kabupaten dan diserahkan sampai ke kementerian.

Namun demikian, CFS tak membantah jika memang data DK terverifikasi dan tervalidasi di dalam dokumen e-RDKK, namun pihaknya membantah terlibat dalam manipulasi data DK.

Ia menambahkan, proses penyusunan RDKK dilakukan secara berjenjang. Dimulai dari paling bawah yakni kelompok tani (poktan), ia juga tak menampik jika data DK disusun oleh kelompok tani yang lama sejak tahun 2018.

"Saya masuk sebagai ppl di Desa Genengadal tahun 2019, sedangkan data DK disusun oleh kelompok tani di tahun 2018. Sebagai ppl saya sudah menyampaikan setiap ada pertemuan dan mewanti-wanti kepada petani dan kelompok tani dalam mencatat serta menyusun RDKK harus sesuai persyaratan RDKK," tegaskan.

Oleh karena itu, penyusunan RDKK berdasarkan Permen no 67 Tahun 2016 mengatur tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. Sedangkan dalam pasal Pasal 4 RDK dan RDKK, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 huruf a, berkaitan dengan kewajiban penyusunan RDK (Rencana Definitif Kebutuhan) dan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) oleh petani atau kelompok tani. Pasal ini menegaskan bahwa RDK dan RDKK harus disusun oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, seharusnya kelompok tani melaporkan kepada ppl mengenai data yang harus diganti atau tidak sah untuk direvisi setiap tahun, namun jika tidak dilaporkan kelompok tani ppl tak akan pernah tahu jika data DK masih tercantum dalam dokumen e-RDKK.

Lebih lanjut, ia juga mengharapkan dalam penyusunan RDKK kelompok tani dan gapoktan harus lebih teliti dan lebih valid sesuai dengan persyaratan pengajuan RDKK, sedangkan untuk KPL hendaknya selalu melaporkan yang berhubungan dengan penebusan pupuk. "Jadi tidak ada tindensi untuk memperkaya diri atau memperkaya orang lain, sebagai petugas ppl saya sudah bekerja sesuai tupoksi," ujarnya.

Hingga berita ini ditayangkan pihak distributor belum berkenan untuk memberikan informasi mengenai manipulasi data fiktif RDKK di Dusun Kedung, Desa Genengadal, kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. (Heni Budianto)

## Sambungan hal 1

Praktik semacam ini berpotensi merugikan negara dan menimbulkan preseden buruk dalam pelaksanaan proyek berbasis dana publik. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan lebih ketat dari instansi teknis terkait dan aparat penegak hukum untuk memastikan proyek berjalan sesuai ketentuan.

Pengamat kebijakan publik dan aktivis transparansi anggaran mendesak pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk turun tangan dan melakukan evaluasi terhadap proyek tersebut.

"Setiap pelaksanaan

## Sambungan hal 1

proyek yang menggunakan dana publik wajib terbuka, mulai dari informasi dasar hingga proses penggerakan. Jika tidak ada keterbukaan, potensi penyimpangan sangat besar," ujar salah satu aktivis yang enggan disebut namanya.

Sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola yang baik, aparat pengawas internal pemerintah daerah bersama APH diharapkan segera melakukan inspeksi langsung ke lokasi proyek dan memberi sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran. (Dikin)

## Sambungan hal 2

organ tubuh, kedua belah pihak – baik penjual maupun pembeli, dapat dikenai sanksi pidana jika terbukti memenuhi unsur-unsur delik TPPO. Dalam perkara ini, kedua terdakwa diberat dengan Pasal 432 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Sidang akan dilanjutkan kembali pada Selasa (24/6/2025) mendatang, dengan agenda pemeriksaan terhadap para terdakwa. (Teddy Syah Roni)

## Sambungan hal 2

Aiptu Herman Efendi, Aiptu Sofian, dan Aipda Holili.

Kapolres mengucapkan selamat secara langsung kepada seluruh penerima penghargaan. "Selamat atas prestasinya. Semoga apa yang telah dicapai oleh seluruh penerima penghargaan hari ini dapat terus ditingkatkan dan menjadi inspirasi bagi rekan-rekan yang lain untuk berbuat yang terbaik dalam setiap pelaksanaan tugas," pungkasnya. (Abd. Rosi)

## Sambungan hal 12

dari kelompok kami banyak yang mati, sekarang tinggal 18 ekor. Sapi yang mati sudah kami laporkan berikut dengan data dan bukti yang ada kepada pemangku kepentingan."

"Kami dari kelompok Tani Mulyo sangat berharap kepada Dinas terkait adanya

## Proyek Bronjong ...

Kritik juga datang dari warga sekitar, terutama pihak sekolah dan orang tua murid SMP Ahmad Yani. Jalan utama menuju sekolah rusak parah akibat lalu lintas kendaraan berat yang mengangkut material proyek. Lubang dan genangan air kini mengganggu aktivitas pelajar dan warga sekitar.

"Ini jelas merugikan warga dan siswa. Pertanyaannya, siapa yang harus bertanggung jawab atas kerusakan jalan ini?" tegas Darsono.

Tim investigasi BN yang turun ke lokasi mencatat bahwa kualitas pekerjaan bronjong juga masih diragukan. Beberapa titik terlihat belum rapi, dan pemasangan tidak merata. Bahkan, muncul kesan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OPSDA 2 BBWS Citanduy, Pak Yahya, telah "dikhianati" oleh pemberontang yang melaksanakan pekerjaan secara asal-asalan.

Darsono menyebut dirinya telah menghubungi langsung Pak Yahya selaku Kepala OPDA 2 BBWS Citanduy untuk menyampaikan aspirasi warga, sekaligus meminta agar pembangunan tahap selanjutnya difokuskan pada wilayah hulu sungai. (Asep sujana)

## Bereliminasi Ciptakan ...

secuilpun rasa keberatan dengan keberadaan kita, hanya pas pada waktu menanyakan berapa beaya jika ADV atau pemberitaan tentang kegiatan sekolahnya dimuat didalam koran atau online Bidik Nasional, terlintas tampak dahinya mengerutkan kening dan berkata apabila mereka yang seprofesi tidak pula menuntut meminta hal yang sama, saya tidak keberatan, ucap Kasek

Upt SD Negeri wilayah Driyorejo. Menimpali akan hal itu, sejauh mana peran K3S kecamatan Driyorejo dalam berorganisasi, selain guna mongkoordinir para anggotanya, apakah tidak ada kiat atau siasat untuk bekerjasama yang apik dan terlebih saling menguntungkan, lanjut tanya awak media ?, dengan nada yang sedikit berkesan kritis.

Menurutnya, akan hal itu, sejauh mana peran K3S kecamatan Driyorejo dalam berorganisasi, selain guna mongkoordinir para anggotanya, apakah tidak ada kiat atau siasat untuk bekerjasama yang apik dan terlebih saling menguntungkan, lanjut tanya awak media ?, dengan nada yang sedikit berkesan kritis.

Perlu diketahui, bahwa jika berminat menanyangkan jenis apapun artikel dalam media kami Cetak & Online Bidik Nasional tentu tidak sekaku atau seradikal demikian sifatnya, akan saya fasilitasi berbicara langsung dengan Pimpinan Redaksi, dengan harapan transparansi dan kredibilitas yang melahirkan integritas akan senantiasa terjaga pada semua pihak atau mitra.

Ibu Kasek Upt SD Negeri wilayah Driyorejo setelah mendisposisi kerjasama dalam bentuk partisipasi berlangganan koran mingguan Bidik Nasional sedikit menjelaskan bahwa dalam kesehariannya terdapat lebih dari 5 kunjungan dari pada pers media, bahkan terkadang lebih, ungkapnya.

Terkait hal itu, lembaga pendidikan yang menjadi tempat bertugas Ketua K3S kecamatan Driyorejo juga mengalami hal yang sama atau bahkan nyaris sama setiap bulan tensesi yang diberikan terhadap keberadaan pers media, masak harus anggaran operasional sekolah lebih banyak tersita untuk hal

## KPH Purwodadi ...

Bertempat di Kantor BKPH Jatipohon, telah dilaksanakan kegiatan Penyerahan Sharing Produksi Kayu Sengon kepada LMDH Jati Makmur, Desa Sumber, Kecamatan Jatipohon. Pada Senin (16/06).

Sharing produksi senilai Rp. 34.919.268,- diserahkan secara langsung oleh Wakil Administrator Perhutani KPH Purwodadi kepada Ketua LMDH Jati Makmur, yang disaksikan oleh jajaran Asper, petugas lapangan dan perwakilan anggota LMDH. Dana sharing tersebut merupakan bagian dari hasil tebangan kayu Sengon pada petak 101B-1 seluas 20,65 hektare dan petak 101B-2 seluas 0,05 hektare, yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan teknis serta perjanjian kerja sama yang berlaku.

Dalam sambutannya, Wakil Administrator Perhutani KPH Purwodadi menyampaikan bahwa penyaluran sharing ini merupakan bentuk tanggung jawab Perhutani sebagai pengelola hutan negara dalam melibatkan masyarakat sekitar hutan secara aktif.

"Pemberian sharing produksi ini adalah wujud nyata kemitraan antara Perhutani dan masyarakat desa hutan. Sesuai dengan prinsip PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat), masyarakat tidak hanya diajak menjaga hutan, tapi juga mendapatkan manfaat ekonominya, setiap pihak yang terlibat memiliki hak dan kewajiban yang jelas. Semoga data ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan anggota LMDH dan mendukung kelestarian hutan," ujar beliau.

Sharing produksi merupakan bagian dari hasil penjualan kayu tebangan yang dialokasikan untuk LMDH sebagai mitra Perhutani dalam kegiatan perlindungan dan pemeliharaan hutan. Besarnya dihitung berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam pedoman PHBM, di mana LMDH memperoleh persentase tertentu dari nilai jual bersih kayu setelah dikurangi biaya produksi.

Sementara itu, Ketua LMDH Jati Makmur, Saryono, menyampaikan rasa syukurnya atas penyerahan sharing yang diterima. Ia menegaskan bahwa perhitungan dan realisasi pembagian hasil telah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama sebelumnya.

"Kami sangat puas dan berterima kasih kepada Perhutani KPH Purwodadi. Dana sharing yang kami terima hari ini sesuai dengan perhitungan dan perjanjian kerja sama yang telah dibahas sejak awal. Ini menjadi bukti bahwa kemitraan antara LMDH dan Perhutani berjalan dengan baik dan transparan," ungkapnya.

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk keberhasilan program Perhutani Sosial melalui skema kemitraan, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam pengelolaan hutan. Dengan pola kerja sama yang saling menguntungkan dan berlandaskan aturan yang jelas, diharapkan hubungan harmonis antara Perhutani dan masyarakat dapat terus ditingkatkan guna mencapai tujuan bersama: hutan lestari, masyarakat sejaht

# Ketua DPRD Magetan Kunjungi Puskesmas Panekan



Ketua DPRD Magetan Ratno didampingi Kepala Puskesmas Panekan Drg. Ari Wibawa saat mengunjungi Gedung Puskesmas Panekan.

**MAGETAN, BN** - Proyek berkelanjutan bangunan Puskesmas Panekan yang diharapkan Kepala Puskesmas Panekan Drg. Ari Wibawa bisa dilanjutkan untuk tahun 2025. Ketua DPRD Magetan, Ratno, Rabu (18/6) meninjau langsung bangunan tersebut, bahkan Ratno menyempatkan diri memeriksakan kesehatan di Puskesmas tersebut.

Pemeriksaan kesehatan meliputi laboratorium, phisik, kolesterol, tekanan darah dan sebagai nya, Ratno pun mengikuti dari pengecekan tekanan darah, gejala penyakit diabetes dan lain-lain.

Seusai memeriksakan kesehatan diri, kemudian meninjau juga kinerja dan fasilitas kesehatan yang ada di Puskesmas termasuk ruang rawat inap yang ada sambil menanyakan para pengunjung yang antri atau pun yang berada di rawat inap.

Ratno berkomentar saat usai memeriksakan kesehatan diri, memberikan apresiasi kepada para staf puskesmas Panekan atas Kinerja Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat secara bagus.

Berdasarkan program Visi Misi Bupati saat mencalonkan bupati kemarin, untuk itu setelah itu visi misi tersebut diwujudkan dan diselaraskan dengan program Gubernur Jawa Timur dan Nasional, maka peningkatan status Puskesmas ke rumah sakit sangat perlu baik dari segi sarana dan prasarana perlu diadakan dan sediakan termasuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatan ke masyarakat tidak boleh diabaikan," kata Ratno.

Akhir kata Ratno pun mengucapkan, untuk Komisi C segera turun langsung ke Puskesmas-puskesmas terkait progres pelayanan kesehatan gratis yang ada sampai sejauh mana kegiatan tersebut terlaksana karena pelaksanaan pemeriksaan kesehatan masyarakat secara gratis, Kabupaten Magetan berada di posisi 4.

Himbauan Ratno Ketua DPRD, Kepada seluruh masyarakat Magetan di ajak untuk memeriksakan kesehatan diri secara gratis di Pukesmas-puskesmas dan posyandu yang ada di seluruh Kabupaten Magetan dan saat posisi dimana pun berada atau beda kecamatan tempat tinggal tiada masalah. "Untuk progres pembangunan puskesmas Panekan Tahun 2025 dilanjutkan karena telah dianggarkan, ucap Ratno pula.

Keterangan langsung dari Drg. Ari Wibawa Kepala Puskesmas Panekan Magetan, penyediaan rawat inap yang normal 38 kamar, untuk Rumah Sakit Type D harus mempunyai sarana rawat Inap 50 kamar, sehingga hanya menambah sedikit saja penyediaan kamar rawat inap saja. (Adv/Ashar)

## Kenduri Haul Bung Karno 2025 Dihadiri Sejumlah Menteri dan Ibu Megawati



**BLITAR, BN** - Sejumlah Pejabat turut menghadiri Haul Bung Karno yang digelar pada Hari ini Jumat (20/6/2025). Acara digelar di sepanjang jalan Soekarno mulai perempatan PGSD hingga depan makam Bung Karno, sejumlah tamu kehormatan hadir diantarnya Walikota Blitar Syauqul Muhibbin, Wakil Walikota Blitar Elim Tyu Sambar, Kapolreda Blitar, Dandim, serta Danyon 511 Blitar, Megawati serta sejumlah menteri di kabinet Indonesia Bersatu juga hadir.

Selain juga terlihat hadir tokoh-tokoh PDIP Ganjar Pranowo, Daud Abdullah P, anggota DPRD kota

Blitar serta Bupati Blitar drs. H Rijanto MM serta anggota DPRD kabupaten Blitar. Sedang yang mengisi pengajian dan doa adalah Gus Muwafiq.

Sebelumnya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka pada Hari selasa (18/6) juga datang ke Blitar untuk ikut membuka dan meramaikan Blitar Jadul yang digelar mulai 18 - 22 Juni 2022.

Saking banyaknya tamu yang hadir sampai hotel - hotel kelas atas tidak dapat menampung tamu. Oleh karena itu pemkot juga merekomendasikan untuk menginap di hotel Kediri dan Tulungagung.

Acara dimulai jam 19.00 WIB tamu tamu mulai hadir di jalan Soekarno mulai PGSD hingga depan makam sang proklamator Bung Karno. Mulai dari Walikota, Wakil Walikota, sejumlah menteri, Megawati, Forkopimda serta pejabat di lingkungan pemerintah Kota Blitar. Usai dibacakan sejarah Bung Karno yang isinya berisi tentang lahirnya Bung Karno hingga kematianya pada tanggal 20 Juni 1970.

Soekarno lahir dari pasangan Soekemi Sosrodiningrat dan Raden Ayu Nyoman Rai pada 6 juni 1901 di Surabaya. Ir. Soekarno yang dilahirkan 6 Juni 1901 dan meninggal pada 21 Juni 1970 biasa dipanggil dengan Bung Karno adalah negarawan dan Presiden Republik Indonesia yang pertama memimpin Republik Indonesia mulai 1945 sampai 1970.

La menjadi Presiden Republik Indonesia pertama setelah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia bersama wakilnya Drs. Muhammad Hatta. Masa kecil hanya beberapa tahun hidup bersama kerja orang tuanya di Surabaya. Selesai Sekolah Dasar hingga Tamat, Soekarno hidup indekos di rumah Haji Omar Said Tjokroaminoto politisi kawakan pendiri partai Syarikat Islam. Soekarno lalu melanjutkan sekolah di HBS (Hogere Burger School). Saat belajar itu Seokarno telah memupuk nasionalisme di sanubarinya. Usai lulus HBS pada tahun 1920 Soekarno lalu pindah ke Jawa barat melanjutkan sekolah ke THS atau Sekolah Teknik Tinggi yang Sekarang disebut Institut Teknologi Bandung (ITB). Beliau berhasil meraih gelar Insinyur pada 25 Mei 1926.

Kiprah Soekarno pun berlanjut ke dunia politik. Kemudian Pria yang akrab dipanggil Bung Karno merumuskan ajaran Marhaenisme serta mendirikan partai yang bernama Partai Nasional Indonesia (PNI) pada 4 Juli 1927. Tujuan didirikannya partai ini untuk menuju Indonesia Merdeka.

Kumpeni Belanda yang tidak senang dengan pergerakan Bung Karno lantas mengambil tindakan agar pemerintah India Belanda saat itu masih kokoh berdiri di tanah jahannya.

Setelah aktif dalam pergerakan perjuangan terus diawasi Belanda hingga berkali kali diasingkan sampai dipenjarakan.

Soekarno yang dikenal sebagai pemimpin khatismatik serta karakteristik yang kuat dan dialah yang meletakkan Pancasila sebagai dasar negara. Usai pembacaan biografi Soekarno maka acara dilanjutkan dengan pembacaan doa dan acara 1000 tumpeng telah dilaksanakan oleh pemerintah dan warga kota Blitar. (Adv/Sastro)

## Satpol PP Magetan Bea Cukai, Polisi dan Kejaksaan Kembali Gelar Operasi Gempur Rokok Ilegal



**MAGETAN, BN** - Bulan Mei 2025 dan Juni ini tim gabungan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Magetan bidang Penegakan Perda (Gakda) bersama Bea Cukai Madiun dan Aparat Penegakkan Hukum (APH) yaitu Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Magetan melakukan operasi Gempur Rokok Ilegal.

Operasi yang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 4-5 Juni 2025 di tiga lokasi Kecamatan, yaitu Parang, Poncol dan Plaosan. Tim menyusuri toko-toko dan warung-warung dan sebagainya hasil nya pun nihil.

Wartawan Bidik Nasional (BN) pun mengikuti operasi pada hari pertama (24/5) di lokasi Kecamatan Plaosan Magetan dari toko ke toko dan dari warung ke warung, namun hasil nya kosong dalam operasi gabungan Gempur Peredaran Rokok Ilegal dan hasil nya juga sama dengan di 2 kecamatan lainnya.

Twintan dari kejaksaan yang merupakan salah satu tim gabungan menyampaikan saran kepada pemilik toko dan atau pun warung bahwa, jangan tergoda rayuan Sales (penjual) yang menawarkan rokok ilegal untuk dijual kembali, meskipun harga murah.

"Dampak nya bila ibu pemilik toko/warung membilinya dan terus menjual kembali akan merepotkan kembali kepada bapak/ibu kedepannya, paling tidak panjenengan akan direpotkan dengan pikiran dan waktu agak lama untuk penyelesaian penjualan rokok ilegal," kata Twintan.

Silih berganti antara petugas Satpol PP, Bea Cukai, kepolisian dan kejaksaan sesaat sebelum meninggalkan toko atau pun warung tersebut agar mereka tidak akan menjual rokok ilegal sampai kapan pun, karena bagi pembeli akan lebih berbahaya dampak kadar Nikotin yang tidak terdeteksi, bagi pemerintah tidak ada pajak yang masuk ke Negara dan masyarakat pun juga dibutuh rugi akibat dari pajak rokok ilegal tidak masuk ke Negara, sehingga Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau tidak ada kembali untuk kepentingan masyarakat itu sendiri khusus nya di bidang Kesehatan.

Gunendar mengutarkan, meskipun indikasi peredaran rokok ilegal masih terjadi secara terselubung, pihaknya tetap secara rutin mengadakan patroli baik secara langsung seperti saat ini atau secara lain nya dan meskipun sistem peredaran rokok ilegal jauh berbeda seperti hal nya pemanfaatan platform online dan atau bisa juga distribusi dari rumah ke rumah atau langsung perorangan.

"Berdasarkan hal itu, kami terus menjalin kerja sama dengan aparat desa, tokoh masyarakat serta memaksimalkan peran Satgas Rokok Ilegal di tingkat Kecamatan secara intensif," ujar Gunendar.

Ia berharap kolaborasi ini mampu menciptakan kesadaran yang lebih luas di masyarakat agar tidak lagi mengkonsumsi, memproduksi, maupun mengelebar rokok ilegal.

Gunendar pun menjelaskan, bahwa dari hasil gelar operasi secara langsung dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Magetan saat Tahun 2022 hingga Tahun 2024 mengalami penurunan yang arti nya para penjual dan para pembeli rokok ilegal sudah memahami dan mempunyai kesadaran tinggi tentang Rokok Ilegal sangat merugikan berbagai pihak termasuk Negara.

"Meskipun hasil operasi di Tahun 2024-2025 ini tidak seperti operasi yang dilakukan di Tahun 2022 - 2023 masih menemukan peredaran rokok ilegal di toko-toko dan atau pun diwarung-warung namun di Tahun 2025 ini minim sekali temuan peredaran adanya rokok ilegal," ucapan Gunendar. (Adv/Ashar)

## Tingkatkan Kapasitas Kelompok Tani Ternak, DKPP Kabupaten Madiun Adakan Pembinaan



**MADIUN, BN** - Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sub. Bidang Peternakan, hari Rabu (18/6/2025) mengadakan pembinaan terhadap kelompok tani ternak (kambing/sapi) yang teralokasi menerima bantuan pada tahun 2021 - 2022 dan 2024 - 2025 yang diikuti sekitar 25 kelompok tani ternak, dimana tiap kelompok diwakili 2 peserta, bertempat di Aula Kantor DKPP Kabupaten Madiun. Turut hadir para narasumber dari Inspektorat serta Dinas pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun.

Acara dibuka oleh Drh. V. Bagus Sri Yu Liyanti Kepala Bidang Peternakan yang mewakili Kepala Dinas Ketahanan pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun. Pada kegiatan itu menuturkan, salah satu tugas pokok dan fungsi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sub. Bidang Peternakan yaitu melakukan pembinaan terhadap kelompok tani ternak, yang bertujuan agar dapat mengembangkan potensi Peternakan yang dimiliki, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan di bidang Peternakan serta dapat meningkatkan produktivitas dari hasil peternakan, yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan dari anggota kelompok tersebut.

Lanjutnya, selain itu agar kelompok tani ternak bisa berinovasi, melakukan diversifikasi produk sehingga dapat menambah pendapatan, yang akhirnya bisa membantu kemandirian kelompok tani ternak dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar, serta dapat meningkatkan kesejahteraan anggota.

Di tempat yang sama, Sri Sudati Muviedha narasumber dari Inspektorat Kabupaten Madiun mengatakan, kelompok tani ternak menerima bantuan dari pemerintah secara kelompok, jadi kelompok harus bekerja sama dengan baik dan kompak, karena segala sesuatunya dipertanggung jawabkan secara bersama-sama.

Sedang bantuan ternak diberikan dengan tujuan untuk bisa berkembang biak dan menambah populasi ternak, sehingga kesejahteraan anggota meningkat, tentunya juga harus dibarengi dengan terti administrasi dan pelaporan, sehingga kelompok akan berjalan sesuai dengan perencanaan dan terhindar dari masalah hukum.

"Mengapa perlu dibentuk kelompok tani ternak", kata Sepi Muhamad Rofei selaku narasumber dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun mengawali bicaranya.

Dengan dibentuknya kelompok tani ternak, tentunya akan lebih efisien meningkatkan produktivitas dan pemasaran secara bersama-sama, selain itu dapat memudahkan akses permodalan, pengembangan diri, pemberdayaan, pengembangan wilayah dan meringankan penanggulangan masalah.

"Dengan demikian pembentukan kelompok tani ternak sangat berguna untuk memajukan sektor peternakan, meningkatkan kesejahteraan peternak dan mendukung pembangunan ekonomi pesedaan," jelasnya.

Untuk itu, strategi menumbuhkan dinamika kelompok yang positif dan produktif sangat di perlukan, melalui peningkatan aktivitas penyuluhan dan pelatihan, penguatan kepemimpinan dan peran anggota, pengembangan motivasi dan pengalaman anggota serta mendorong anggota mencari informasi dan inovasi baru.

"Ditunjang dengan melakukan kegiatan pencatatan kegiatan oleh kelompok yang biasa disebut Administrasi Kegiatan serta pencatatan



Para peserta Kelompok Tani Ternak sedang serius mendengarkan penyuluhan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sub. Bidang Peternakan. (Ist)

■ Bersambung ke hal.11 kol.1